



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 024-7608201, Fax. 024-7612334
Laman <http://www.pusdataru.jatengprov.go.id> Surat elektronik pusdataru@jatengprov.go.id



RENSTRA 2024-2026

RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR
DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 024-7608201, Fax. 024-7612334
Laman <http://www.pusdataru.jatengprov.go.id> Surat elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor: 050.11/2913

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Ir. SR. Eko Yuniyanto, Sp.1

NIP : 19640601 199302 1 002

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

Berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/186/2019 tanggal 6 Mei 2019, bertugas untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Madukoro Blok AA-BB Kota Semarang.

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan serta program kerja berdasarkan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Rensta Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Mei 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. SR. EKO YUNIAN TO. Sp.1

Pembina Utama Muda

NIP. 19640601 199302 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	II-1
2.2 Sumber Daya Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah	II-11
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah	II-20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah	II-24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	III-1
3.2 Penentuan Isu-isu Strategis	III-2
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah	IV-1
4.2 Manajemen Risiko Strategis Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah	IV-2
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Serta Pendanaan Tahun 2024-2026 Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1 Indikator Kinerja Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah	VII-1
BAB VIII PENUTUP	
8.1 Kesimpulan	VIII-1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah II-11
Tabel 2.2	Debit Banjir Rerata Tahunan dan Debit Minimum Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah II-12
Tabel 2.3	Bendungan di Provinsi Jawa Tengah II-13
Tabel 2.4	Embung dan Longstorage di Provinsi Jawa Tengah (sd. Th 2022) II-15
Tabel 2.5	Sebaran Pembangunan Embung dan Long Storage melalui APBD di Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah (kondisi sd. Tahun 2022) II-15
Tabel 2.6	Output Perbaikan Irigasi (Kewenangan Provinsi) II-17
Tabel 2.7	Panjang Pantai di Provinsi Jawa Tengah (meter) II-18
Tabel 2.8	Ketersediaan Prasarana Kesiapsiagaan Banjir II-19
Tabel 2.9	Daftar Alat Komunikasi Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah II-20
Tabel 2.10	Capaian Kinerja Pelayanan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 II-21
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 II-22
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas PUSDATARU III-1
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah IV-1
Tabel 4.2	Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 IV-2
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 V-2
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 VI-2
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 VII-1
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPD VII-1

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 2.1	Proporsi ASN berdasarkan jenis kelamin (%) dan golongan kepangkatan (orang)	II-10
Grafik 2.2	ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang)	II-11
Grafik 2.3	Progress Penanganan Sungai Tahun 2013-2022	II-12
Grafik 2.4	Presentase Fisik Sungai Dalam Kondisi Baik Tahun 2013-2022	II-13
Grafik 2.5	Jumlah Embung Yang Dibangun Melalui APBD Pada Dinas Pusdataru Prov. Jawa Tengah Tahun 2013-2022	II-16
Grafik 2.6	Manfaat (Outcome) Perbaikan Irigasi Tahun 2013-2022 (dalam satuan hektar)	II-17

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah	II-2

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Dokumen Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, beserta indikator kinerja dan targetnya dengan kebutuhan pendanaan indikatifnya dalam kurun waktu Tahun 2024-2026. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan, sekaligus sebagai pijakan dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan.

Dengan dukungan penuh segenap pelaku, pengguna dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Air (SDA) serta Penataan Ruang, diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dapat mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 31 Mei 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1
Pembina Utama Muda
NIP. 19640601 199302 1 002

BAB I

RENSTRA

2024-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana Strategis berfungsi sebagai alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menggambarkan proses berkelanjutan yang merupakan penjabaran RPJMD.

Berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023, Renstra PD disusun bersamaan dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Renstra Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, disusun bersamaan dengan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam upaya pencapaian tujuan, sasaran dan target Rencana Kerja (Renja) tahunan pembangunan pada sektor sumber daya air dan sektor penyelenggaraan penataan ruang.

Renstra Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran yang termuat dalam RPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 yaitu “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari” khususnya pada Sasaran Daerah ke-1 “Meningkatnya Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan berkelanjutan” dan Sasaran Daerah ke-3 “Meningkatnya Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Upaya pencapaian tujuan, sasaran, program/kegiatan pembangunan pada sektor sumber daya air dalam Renstra Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 juga diselaraskan dengan upaya pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang termuat dalam Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020-2024 untuk tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan nasional yaitu pada Tujuan ke-1 “Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam ” dengan Sasaran Strategis ke-1 “Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air”.

Pada sektor penyelenggaraan penataan ruang, penyusunan Renstra ini juga diselaraskan dengan pencapaian tujuan, sasaran, program/kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, yaitu pada Tujuan ke-2 “Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” dengan Sasaran Strategis ke-2 “Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang”

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
7. Peraturan Pemerintah Nomer 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010, yaitu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Daerah Irigasi;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menyiapkan instrumen perencanaan yang memberikan gambaran kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang di Provinsi Jawa Tengah sebagai indikator kinerja dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan penyusunan Renstra yaitu tersedianya dokumen perencanaan strategis sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan sesuai dengan tujuan, dan sasaran yang akan dicapai, menyesuaikan dengan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat serta mengacu pada kebijakan sektor sumber daya air dan penataan ruang tingkat nasional dan provinsi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB. I Pendahuluan ;

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB. II Gambaran Pelayanan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;

Memuat uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan serta tantangan dan peluang pengembangan layanan sumber daya air dan penataan ruang di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

BAB. III Permasalahan Dan Isu-isu Strategis Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;

Memuat identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra K/L dan RPJMD Provinsi, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta Penentuan Isu-isu strategis.

BAB. IV Tujuan Dan Sasaran;

Memuat tujuan, sasaran serta Manajemen resiko strategis Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

BAB. V Strategi Dan Arah Kebijakan;

Memuat strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2024-2026.

BAB. VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;

Memuat uraian rencana program dan kegiatan, sub kegiatan, beserta kinerja, indikator, target dan pendanaan indikatifnya pada Tahun 2024-2026.

BAB. VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;

Memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

BAB. VIII Penutup.

Berisi Kesimpulan yang terdiri kaidah pelaksanaan Renstra, serta catatan dan harapan Kepala Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.

BAB II
RENSTRA
2024-2026

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum sub urusan sumber daya air dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Fungsi :

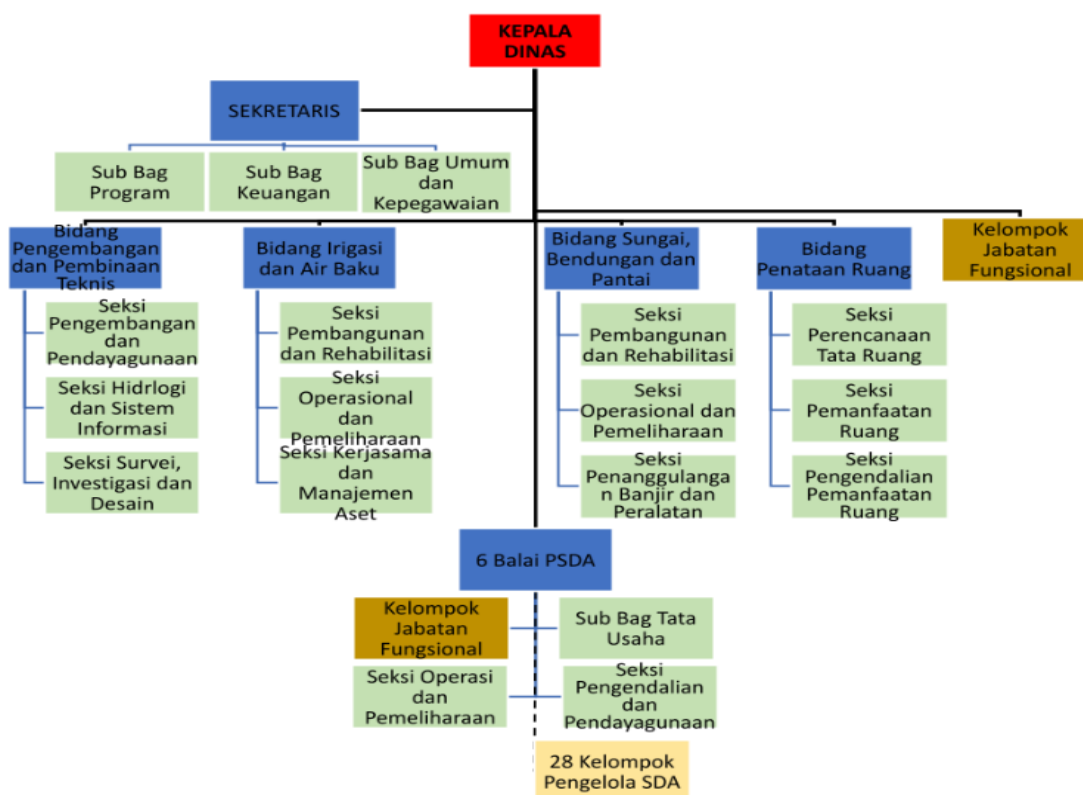
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis, Irigasi dan Air Baku, Sungai, Bendungan dan Pantai serta Penataan Ruang;
2. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis, Irigasi dan Air Baku, Sungai, Bendungan dan Pantai serta Penataan Ruang;
3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis, Irigasi dan Air Baku, Sungai, Bendungan dan Pantai serta Penataan Ruang;
4. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Sekretariat:
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis:
 - a. Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan
 - b. Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi
 - c. Seksi Survei, Investigasi dan Desain
3. Bidang Irigasi dan Air Baku :
 - a. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi
 - b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan
 - c. Seksi Kerjasama dan Manajemen Aset

4. Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai:
 - a. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi
 - b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan
 - c. Seksi Penanggulangan Banjir dan Peralatan
5. Bidang Penataan Ruang:
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang
 - b. Seksi Pemanfaatan Ruang
 - c. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah, terdiri dari :
 - a. Balai PSDA Pemali Comal
 - b. Balai PSDA Bodri Kuto
 - c. Balai PSDA Serang Lusi Juana
 - d. Balai PSDA Bengawan Solo
 - e. Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
 - f. Balai PSDA Serayu Citanduy
7. Kelompok Jabatan Fungsional
 Adalah staf penunjang Kepala Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan tugas - tugas yang bersifat fungsional dengan jumlah tenaga jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah

Berikut uraian tugas pokok dan fungsi sesuai bagan Struktur Organisasi Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah :

1. **Sekretariat** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pelaksanaan kesekretariatan, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahi :

- a. Subbagian Program; yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Program, meliputi : koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- b. Subbagian Keuangan; yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan, meliputi : koordinasi, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian; yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian, meliputi : koordinasi, pengelolaan ketatausahaan, pengelolaan rumah tangga, pengelolaan pengarsipan dan dokumentasi, penataan organisasi hukum dan ketatalaksanaan, pelaporan dan evaluasi di lingkungan Dinas.

2. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan, Hidrologi dan Sistem Informasi, dan Survei, Investigasi dan Desain. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Hidrologi dan Sistem Informasi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Survei, Investigasi dan Desain;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis, membawahi :

- a. Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan, meliputi : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan, menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan, menyiapkan bahan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, menyiapkan bahan pembinaan dan penerapan sistem jaminan mutu, menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi pelaksanaan manajemen mutu, menyiapkan bahan rekomendasi teknis perizinan Bidang Sumber Daya Air, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Hidrologi dan Sistem Informasi, meliputi : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Hidrologi dan Sistem Informasi, menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Hidrologi dan Sistem Informasi, menyiapkan bahan analisis hidrologi untuk rencana pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, menyiapkan bahan analisis neraca air dan kualitas air, menyiapkan bahan analisis debit andalan, aliran dasar dan banjir, menyiapkan bahan analisis erosi dan sedimentasi, menyiapkan bahan analisis hidroklimatologi untuk konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air, menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi sumber daya air dan penataan ruang dan menyiapkan bahan pengelolaan data dan sistem informasi sumber daya air dan penataan ruang, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Hidrologi dan Sistem Informasi dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Survei, Investigasi dan Desain; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Survei, Investigasi dan Desain, meliputi : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Survei, Investigasi dan Desain, menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Survei, Investigasi dan Desain, menyiapkan bahan perencanaan teknis operasi dan pemeliharaan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air, menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi hasil survei, investigasi serta desain, menyiapkan bahan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air dan menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Survei, Investigasi dan Desain dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Irigasi dan Air Baku mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Irigasi Dan Air Baku. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Irigasi dan Air Baku mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerjasama dan Manajemen Aset; dan
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugasnya.

Bidang Irigasi dan Air Baku, membawahi :

- a. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi, meliputi : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi, menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi, menyiapkan bahan penyusunan dokumen pelaksanaan dan pengadaan jasa konstruksi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan drainase serta air baku, menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan drainase serta air baku, menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana irigasi dan drainase serta air baku, menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana irigasi dan drainase serta air baku, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Operasi dan Pemeliharaan, meliputi : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Operasi dan Pemeliharaan, menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Operasi dan Pemeliharaan, menyiapkan bahan pelayanan administrasi teknis operasi dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi dan drainase serta air baku, menyiapkan bahan penyiapan norma standar pedoman dan manual operasi dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi dan drainase serta air baku, menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi dan drainase serta air baku, menyiapkan bahan pengendalian, pengoordinasian dan fasilitasi penanganan kekeringan areal irigasi, menyiapkan bahan evaluasi kondisi fisik dan kinerja sistem daerah irigasi, menyiapkan bahan evaluasi angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan daerah irigasi, menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi sarana prasarana irigasi dan drainase, serta air baku, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Operasi dan Pemeliharaan dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - c. Seksi Kerjasama dan Manajemen Aset; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerjasama dan Manajemen Aset, meliputi : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kerjasama dan Manajemen Aset, menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Kerjasama dan Manajemen Aset, menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kerjasama pengelolaan sumber daya air, menyiapkan bahan pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan sumber daya air masyarakat, menyiapkan bahan pengelolaan potensi dan pemanfaatan aset sumber daya air, menyiapkan bahan pengurusan hak atas tanah untuk pengelolaan sumber daya air, menyiapkan bahan fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana prasarana sumber daya air, menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi kerjasama dan manajemen aset, menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian sengketa aset sumber daya air, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerjasama dan Manajemen Aset dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 4. Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Operasi dan Pemeliharaan;

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanggulangan Banjir dan Peralatan;
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai, membawahi :

- a. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi. meliputi : Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi, Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi, menyiapkan bahan penyusunan dokumen pelaksanaan dan pengadaan jasa konstruksi pembangunan dan rehabilitasi sungai, bendungan dan pantai, menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sungai, bendungan dan pantai, menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana sungai, bendungan dan pantai, menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana sungai, bendungan dan pantai, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan; mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Bendungan dan Pantai, meliputi : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Bendungan dan Pantai, menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sungai, bendungan dan pantai, menyiapkan bahan pelayanan administrasi teknis operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sungai, bendungan dan pantai, menyiapkan bahan perumusan norma standar pedoman dan manual operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sungai, bendungan dan pantai, menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sungai, bendungan dan pantai, menyiapkan bahan evaluasi kondisi fisik sarana prasarana sungai, bendungan dan pantai, menyiapkan bahan evaluasi angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sungai, bendungan dan pantai, menyiapkan bahan pengendalian, pengoordinasian dan fasilitasi monitoring bendungan, menyiapkan pengelolaan data dan informasi sarana prasarana sungai, bendungan dan pantai, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Operasi dan Pemeliharaan dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Seksi Penanggulangan Banjir dan Peralatan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan banjir dan peralatan meliputi : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penanggulangan Banjir dan

Peralatan, menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Penanggulangan Banjir dan Peralatan, menyiapkan bahan perumusan norma standar pedoman dan manual pengendalian dan penanggulangan banjir serta pengelolaan alat berat, menyiapkan bahan pengendalian dan penanggulangan banjir serta pengelolaan alat berat, menyiapkan bahan penyusunan spesifikasi teknis penanggulangan banjir dan pengelolaan alat berat, menyiapkan bahan dan peralatan dan melakukan pencegahan dan penanganan darurat skala besar akibat daya rusak air, menyiapkan bahan pelaksanaan tanggap darurat dan operasional alat berat penanggulangan banjir, menyiapkan bahan rekomendasi pemberian izin pemanfaatan alat berat, menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi pelaksanaan penanggulangan banjir dan peralatan, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanggulangan Banjir dan Peralatan dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- 5. Bidang Penataan Ruang** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penataan Ruang. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Tata Ruang;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemanfaatan Ruang;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
 - d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugasnya.

Bidang Penataan Ruang, membawahi :

- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Tata Ruang, meliputi : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Tata Ruang, menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Tata Ruang, menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi, menyiapkan bahan layanan rekomendasi teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota, menyiapkan bahan evaluasi dan evaluasi perencanaan Tata Ruang Provinsi, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Tata Ruang dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Seksi Pemanfaatan Ruang; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan teknis, meliputi : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemanfaatan Ruang, menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Pemanfaatan Ruang, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tentang

penyelenggaraan penataan ruang provinsi, menyiapkan bahan penyediaan data dan sistem informasi penataan ruang provinsi, menyiapkan bahan pembinaan teknis penyebarluasan informasi tata ruang, menyiapkan bahan pengoordinasian program pemanfaatan ruang dengan rencana sektoral, menyiapkan bahan sosialisasi dan penyebarluasan informasi tata ruang, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemanfaatan Ruang dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- c. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang; mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang, meliputi : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemanfaatan Ruang, menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang, menyiapkan bahan pengawasan teknis dan pengawasan khusus pemanfaatan ruang, menyiapkan bahan rekomendasi teknis pemanfaatan ruang tingkat provinsi, menyiapkan bahan penyusunan kajian teknis untuk pemanfaatan ruang, menyiapkan bahan rekomendasi teknis penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (Balai PSDA) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Balai PSDA mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pengaturan, pengalokasian, penyediaan air dan sumber air, pemeliharaan serta pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengaturan, pengalokasian, penyediaan air dan sumber air, pemeliharaan serta pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya air;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Balai PSDA, membawahi:

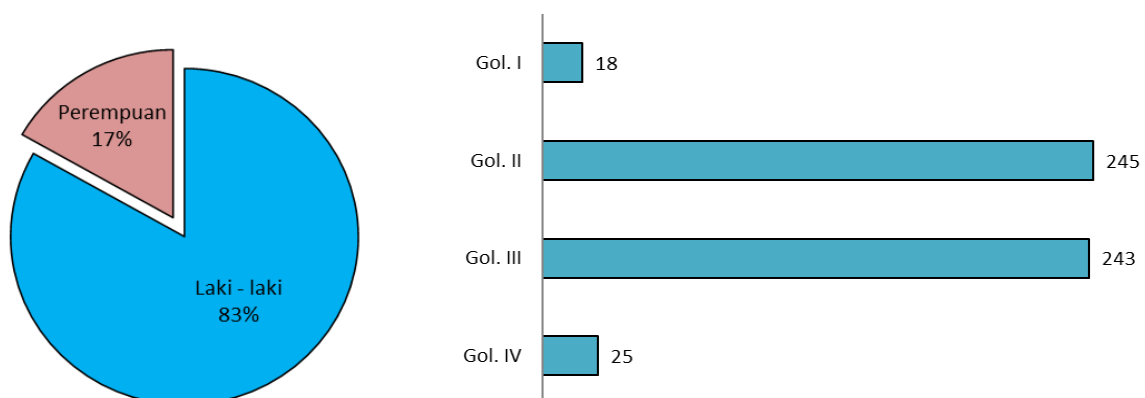
- a. Subbagian Tata Usaha; mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketatausahaan, meliputi: menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Ketatausahaan; menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan; menyiapkan pengelolaan keuangan; menyiapkan pengelolaan ketatausahaan; menyiapkan pengelolaan kepegawaian; menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah; menyiapkan kerja sama dan kehumasan; menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; menyiapkan evaluasi dan pelaporan lingkup Balai; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan; mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Operasi Dan Pemeliharaan, meliputi: menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Operasi Dan Pemeliharaan; menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Operasi Dan Pemeliharaan; menyiapkan pengaturan, pengalokasian dan penyediaan air; menyiapkan pemeliharaan dan perawatan sumber daya air; menyiapkan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana sumber daya air; menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Operasi Dan Pemeliharaan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Seksi Pengendalian dan Pendayagunaan; mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Dan Pendayagunaan, meliputi: menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Pengendalian Dan Pendayagunaan; menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Pengendalian Dan Pendayagunaan; menyiapkan pelaksanaan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengusahaan sumber daya air, dan pemanfaatan ruang; menyiapkan pelaksanaan sosialisasi, pengawasan, pengendalian dan penyusunan rekomendasi teknis izin pendayagunaan sumber daya air; menyiapkan bahan-bahan berupa peta wilayah Balai dan data eksisting pemanfaatan ruang; melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan ruang; menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Dan Pendayagunaan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2. Sumber Daya Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah

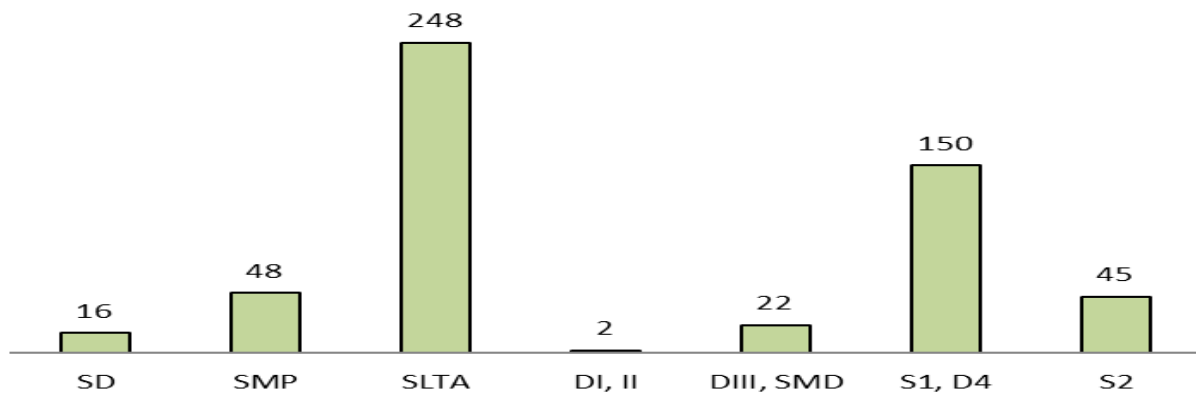
2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Desember 2022 jumlah ASN Dinas PUSDATARU sebanyak 531 orang, terdiri dari 442 laki-laki dan 89 perempuan. Sebagian besar ASN tersebut berada pada golongan III ((243 orang) dan golongan II (245 orang), sedangkan sisanya berada pada golongan IV (25 orang) dan golongan I (18 orang).



Grafik 2.1
Proporsi ASN berdasarkan jenis kelamin (%)
dan golongan kepangkatan (orang)

Berdasarkan latar belakang pendidikan, sebagian besar didominasi dengan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 248 orang, diikuti S1/D4 sebanyak 150 orang, dan S2 (45 orang).



Grafik 2.2
ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang)

Kondisi ASN tersebut beberapa tahun ke depan, jumlahnya akan semakin berkurang dengan adanya beberapa pegawai yang akan memasuki masa purna tugas (pensiun). Sebanyak 31 orang pensiun pada Tahun 2023 dan 27 orang pensiun di tahun 2024.

2.2.2. Dukungan Sarana dan Prasarana

2.2.2.1. Sungai dan Wilayah Sungai

Di Jawa Tengah terdapat 202 daerah aliran sungai (DAS). Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, kewenangan pengelolaan Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

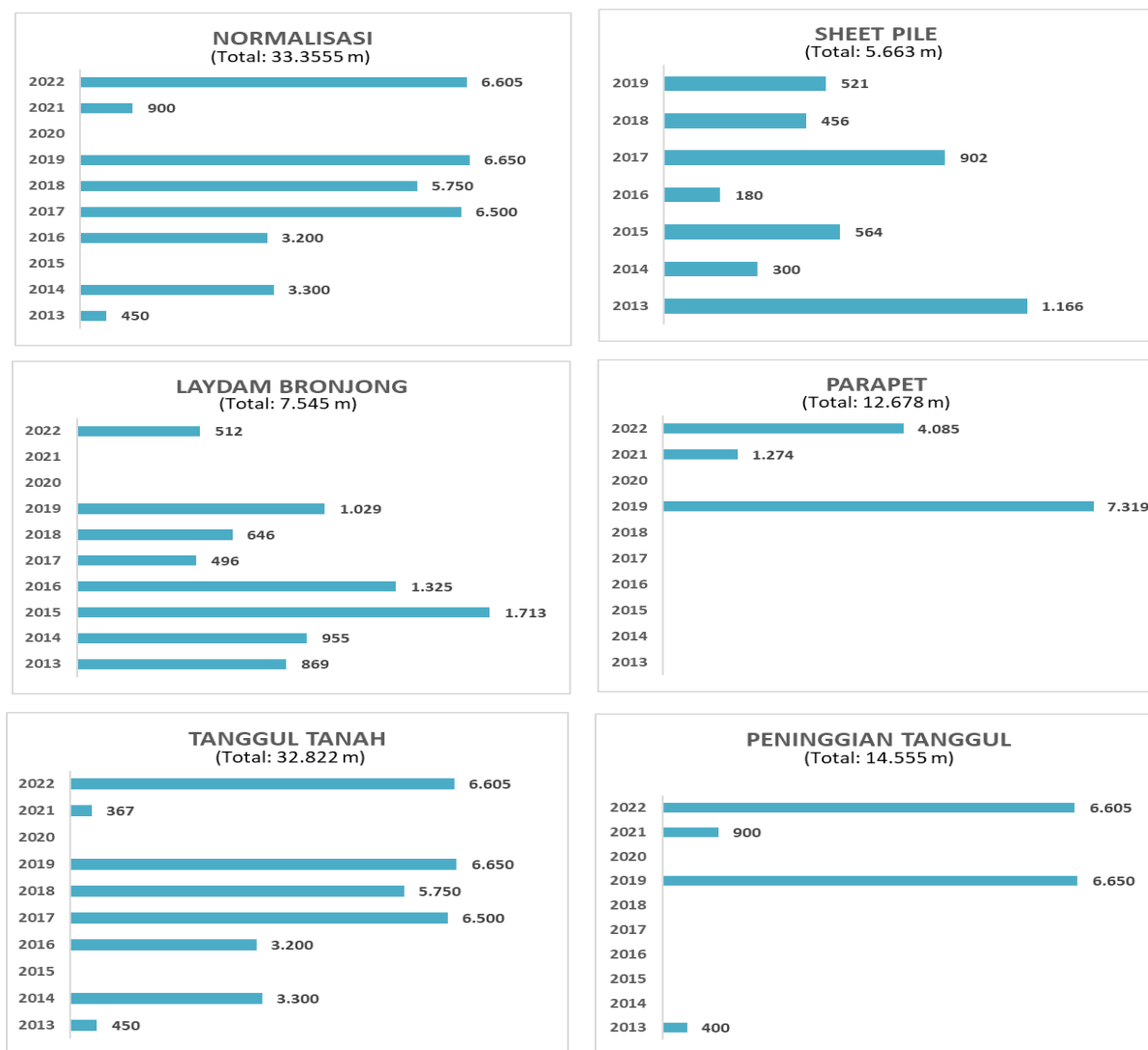
Tabel 2.1
Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah

No	Wilayah Sungai	Jumlah DAS	Kewenangan	Unit Pengelola
1	Cimanuk Cisanggarung	5	Pemerintah	BBWS Cimanuk Cisanggarung
2	Pemali Comal	32	Provinsi Jawa Tengah	Dinas PUSDATARU Prov. Jawa Tengah
3	Bodri Kuto	12	Provinsi Jawa Tengah	Dinas PUSDATARU Prov. Jawa Tengah
4	Jratun Seluna	69	Pemerintah	BBWS Pemali Juana
5	Wiso Gelis	27	Kabupaten Jepara	Dinas PU Kab. Jepara
6	Karimun Jawa	20	Kabupaten Jepara	Dinas PU Kab. Jepara
7	Bengawan Solo	1	Pemerintah	BBWS Bengawan Solo
8	Progo Opak Serang	1	Pemerintah	BBWS Serayu Opak
9	Serayu Bogowonto	15	Pemerintah	BBWS Serayu Opak
10	Citanduy	20	Pemerintah	BBWS Citanduy

Tabel 2.2
Debit Banjir Rerata Tahunan dan Debit Minimum
Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah

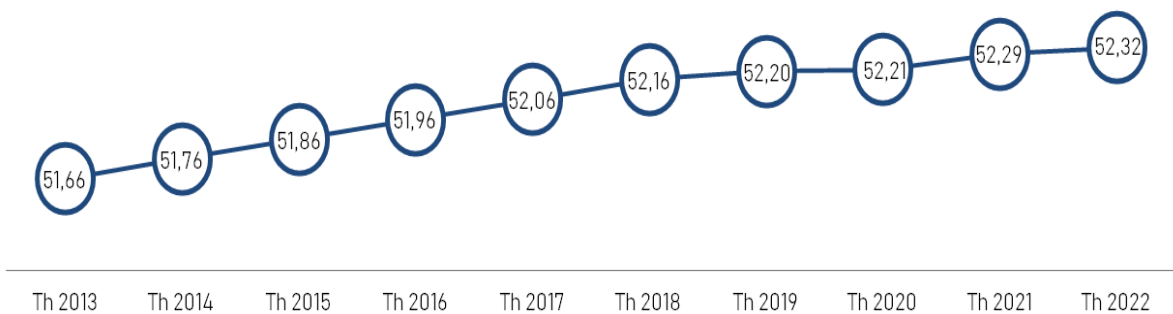
No	Wilayah Sungai	Debit Banjir Rerata Tahunan (m ³ /dt)	Debit Minimum Dependable 80% (m ³ /dt)
1	Cimanuk Cisanggarung	290.41	0.49
2	Pemali Comal	5849.54	17.46
3	Bodri Kuto	2064.31	1.45
4	Jratun Seluna	6934.10	14.66
5	Wiso Gelis	392.39	0.78
6	Karimun Jawa	10.68	0.02
7	Bengawan Solo	233.71	1.38
8	Progo Opak Serang	1209.26	2.41
9	Serayu Bogowonto	4538.41	9.07
10	Citanduy	1200.37	2.41

Upaya peningkatan sarana dan prasarana sungai terus dilakukan. Dalam kurun waktu 2013-2022 pada wilayah sungai kewenangan provinsi (WS Bodri Kuto dan WS Pemali Comal) telah dilakukan normalisasi sepanjang 33.355 meter, pemasangan sheet pile sepanjang 5.663 meter, parapet 12.678 meter dan laydam bronjong sepanjang 7.545 meter.



Grafik 2.3
Progress Penanganan Sungai Tahun 2013-2022

Melalui optimalisasi operasi dan pemeliharaan serta pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana sungai (kewenangan provinsi) tersebut, secara fisik sungai dalam kondisi baik semakin meningkat menjadi 52,32% di Tahun 2022.



Grafik 2.4
Presentase Fisik Sungai Dalam Kondisi Baik Tahun 2013-2022

2.2.2.2. Tampungan Air

Di Jawa Tengah terdapat 11 unit Bendungan Besar (volume > 10 jt m3), 34 unit Bendungan Kecil (volume < 10 jt m3), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Bendungan di Provinsi Jawa Tengah

No	Nama Bendungan	Kabupaten	Layanan Irigasi (Ha)	Elevasi spillway	Volume tampung (Jutam3)	Manfaat
1	Malahayu	Brebes	35,162	55,77	31,14	Irigasi, Banjir
2	Penjalin	Brebes	28.310	339,50	7,77	Irigasi, Banjir
3	Cacaban	Tegal	17.481	77,50	49,02	Irigasi, Banjir
4	Rawapening	Semarang	19.972	463,30	49,90	Irigasi, Air baku, Banjir
5	Gembong	Pati	4.959	207,00	9,50	Irigasi
6	Gunungrowo	Pati	6.052	320,00	5,15	Irigasi
7	Kedungombo	Grobogan	59.544	90,00	689,09	Irigasi, PLTA, Industri dan Air baku, Banjir
8	Tempuran	Blora	923	120,50	2,09	Irigasi, Air baku
9	Greneng	Blora	251	120,80	2,35	Irigasi
10	Lodanwetan	Rembang	440	46,50	4,60	Irigasi
11	Banyukuwung	Rembang	775	51,50	2,42	Irigasi, Air baku
12	Nglangon	Grobogan	750	81,00	1,09	Irigasi
13	Simo	Grobogan	482	82,80	0,42	Irigasi
14	Butak	Grobogan	366	69,95	0,25	Irigasi
15	Sanggeh	Grobogan	260	48,20	0,39	Irigasi
16	Gajahmungkur	Wonogiri	28.109	136,00	440,00	Irigasi, PLTA, Industri & Air baku, Banjir
17	Krisak	Wonogiri	874	113,50	3,75	Irigasi
18	Plumbon	Wonogiri	392	225,40	1,20	Irigasi

No	Nama Bendungan	Kabupaten	Layanan Irigasi (Ha)	Elevasi spillway	Volume tampung (Jutam3)	Manfaat
19	Songputri	Wonogiri	500	224,00	0,60	Irigasi
20	Parangjoho	Wonogiri	700	196,00	1,58	Irigasi
21	Kedunguling	Wonogiri	87	174,00	0,48	Irigasi
22	Nawangan	Wonogiri	354	229,10	0,79	Irigasi
23	Ngancar	Wonogiri	637	249,00	2,12	Irigasi
24	Lalung	Karanganyar	7.394	164,75	5,00	Irigasi
25	Delingan	Karanganyar	2.410	179,10	4,20	Irigasi
26	Gebyar	Sragen	1.370	325,56	0,70	Irigasi
27	Kembangan	Sragen	358	129,20	0,50	Irigasi
28	Botok	Sragen	268	282,78	0,51	Irigasi
29	Ketro	Sragen	892	99,00	2,61	Irigasi
30	Blimbing	Sragen	274	189,70	0,08	Irigasi
31	Brambang	Sragen	295	171,19	0,10	Irigasi
32	Cengklik	Boyolali	1.570	142,60	9,16	Irigasi
33	Klego	Boyolali	1.353	239,50	2,67	Irigasi
34	Jombor	Klaten	782	120,50	3,68	Irigasi
35	Mulur	Sukoharjo	43	110,56	2,75	Irigasi, Air baku
36	Sempor	Kebumen	6.485	72,00	38,04	Irigasi, PLTA, Air baku, Banjir
37	Wadaslintang	Kebumen	31.109	185,00	388,72	Irigasi, PLTA, Air baku, Banjir
38	Grawan	Rembang	-	39,00	0,47	Air baku
39	Jatibarang	Semarang	-	149,30	17,67	Air baku
40	Panohan	Rembang	-	70,00	0,82	Air baku
41	Sudirman	Banjarnegara	8.400	231,00	23,24	Irigasi, PLTA, Air baku
42	Logung	Kudus	2.821	92,78	20,15	Irigasi, Air Baku, PLTMH (baru)
43	Randugunting	Blora	630		14,42	Irigasi, Air Baku, Pengendali Banjir, Pariwisata
44	Gondang	Karanganyar	4.680		9,15	Irigasi, Air Baku, PLTA, Pengendali Banjir, Pariwisata
45	Pidekso	Wonogiri	1.500		25	Irigasi, Air Baku, PLTA, Pengendali Banjir, Pariwisata

Selain bendungan, juga terdapat embung dan *long storage* yang jumlahnya sampai dengan Tahun 2022 mencapai 1.156 unit, dibangun melalui sumber pendanaan APBN, APBD maupun CSR/TJSLP, dimanfaatkan untuk tampungan air sebagai salah satu upaya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air baku bagi masyarakat.

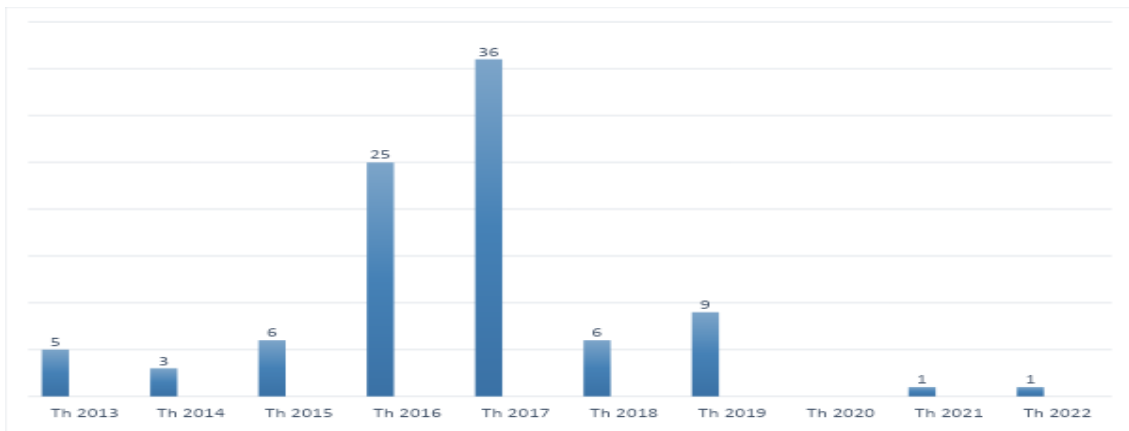
Tabel 2.4
Embung dan Longstorage di Provinsi Jawa Tengah
(kondisi sd. Tahun 2022)

No	INSTANSI/LEMBAGA	SUMBER PENDANAAN	EMBUNG (lokasi)	LONG STORAGE (lokasi)	JUMLAH (lokasi)
1.	Pemerintah Pusat (BBWS)	APBN	141	3	144
2.	Dinas PUSDATARU	APBD	75	17	92
3.	Distanbun	APBD	4	0	4
		APBN	512	0	512
4.	DLHK	DAK	390	0	390
5.	Pemkab (Bankeu)	APBD	11	0	11
6.	CSR/TJSLP	Hibah	3	0	3
TOTAL			1.136	20	1.156

Pembangunan embung dan *longstorage* melalui APBD pada Dinas PUSDATARU sebanyak 92 unit dilakukan secara bertahap, paling banyak pembangunannya pada Tahun 2017, dengan sebaran lokasi pembangunan sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Tabel 2.5
Sebaran Pembangunan Embung dan Long Storage melalui APBD
di Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah (kondisi sd. Tahun 2022)

No	Lokasi Pembangunan	Jumlah (unit)
1	Kabupaten Semarang	2
2	Kabupaten Kebumen	1
3	Kabupaten Rembang	4
4	Kabupaten Kendal	9
5	Kabupaten Purworejo	2
6	Kabupaten Tegal	10
7	Kabupaten Grobogan	5
8	Kabupaten Brebes	12
9	Kabupaten Wonogiri	12
10	Kabupaten Cilacap	7
11	Kabupaten Pati	7
12	Kabupaten Klaten	2
13	Kabupaten Boyolali	1
14	Kabupaten Sragen	4
15	Kabupaten Karanganyar	1
16	Kabupaten Pekalongan	4
17	Kabupaten Blora	4
18	Kabupaten Purbalingga	2
19	Kabupaten Banyumas	1
20	Kabupaten Demak	1
21	Kabupaten Pemalang	1
Total		92



Grafik 2.5
Jumlah Embung Yang Dibangun Melalui APBD
Pada Dinas Pusdataru Prov. Jawa Tengah Tahun 2013-2022

2.2.2.3. Bendung

Bendung sebanyak 236 buah terdiri beberapa tipe, antara lain :

- a. Bendung gerak dengan pintu terdiri dari :
 - Pintu radial, misalnya Bendung Klambu, Bendung Serayu.
 - Pintu sorong (*slice gate*) misalnya Bendung Manganti, Bendung Dumpil, Bendung Colo, Semen Krinjo, Tuk Kuning, Bantar Helang.
 - Bendung gerak kembang kempis atau bendung karet, misalnya Bendung Karet Kumpulan, Bendung Karet Jajar.
- b. Bendung permanen/tetap dari pasangan batu Beton, misalnya bendung Kedung Asem, Bendung Arca.
- c. Bendung karet
- d. Bendung gergaji, misalnya bendung Penggaron.
- e. Bendung dengan kantong lumpur, misalnya bendung Kedungboyo, bendung Piasa.

2.2.2.4. Jaringan Irigasi

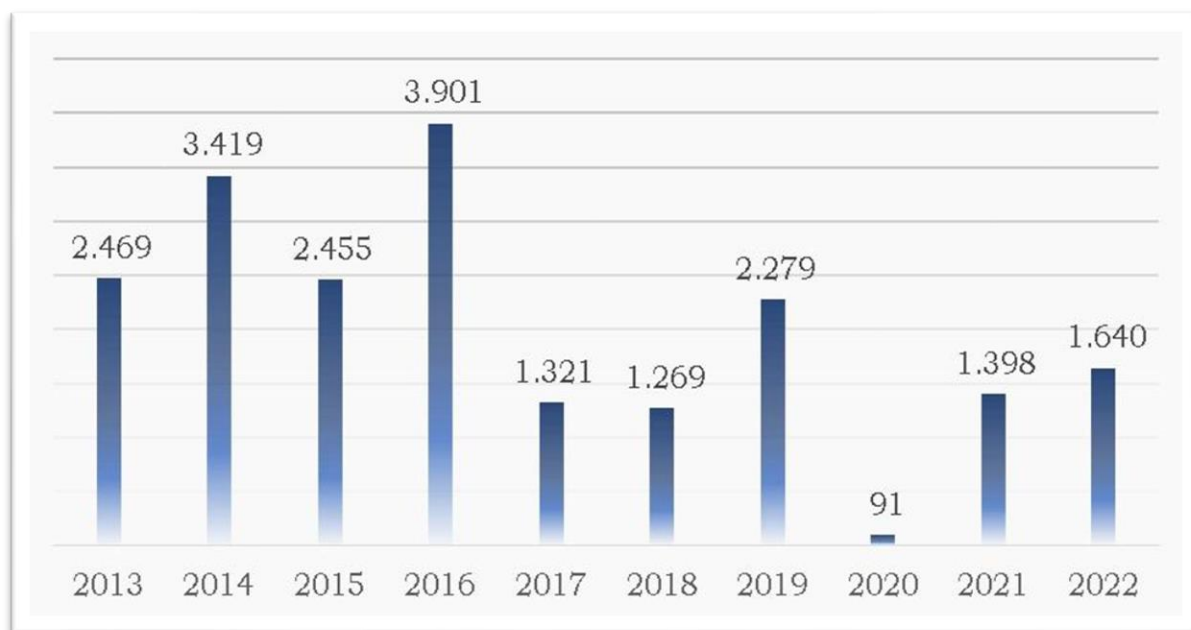
Sektor pertanian yang masih menjadi komoditas utama di Jawa Tengah, sangat memerlukan dukungan dalam hal distribusi air irigasi untuk pertanian. Sebagai organisasi perangkat daerah yang salah satunya memiliki fungsi pelayanan terhadap irigasi, Dinas PUSDATARU memiliki tanggung jawab terhadap 108 Daerah Irigasi (DI) dengan luas 86.865 Ha yang menjadi kewenangan provinsi, dari total keseluruhan daerah irigasi yang ada di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 11.542 DI seluas 953.804 Ha. Sedangkan 33 DI dengan luas 347.674 Ha menjadi kewenangan pusat dan 11.401 DI dengan luas 519.265 Ha kewenangan kabupaten/kota.

- a. Bangunan irigasi, meliputi :
 - 1) Bangunan bagi, bagi sadap, dan sadap sebanyak 6.767 buah.
 - 2) Bangunan pelengkap, antara lain gorong-gorong, *syphon*, talang, jembatan sebanyak 11.289 buah.
- b. Saluran irigasi, meliputi :
 - 1) Saluran induk/primer sepanjang : 1.109,08 km.
 - 2) Saluran sekunder sepanjang : 3.716,91 km.
 - 3) Saluran pembuang sepanjang : 314,58 km.

Upaya untuk menjaga dan meningkatkan kondisi baik jaringan irigasi diwujudkan melalui pekerjaan rehabilitasi daerah irigasi serta optimalisasi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Perbaikan jaringan irigasi (kewenangan provinsi) yang dilakukan dalam kurun waktu 2013-2022 memberikan kontribusi outcome berupa luasan sawah yang terairi setelah dilakukan perbaikan jaringan irigasi dengan total luas 20.242 hektar.

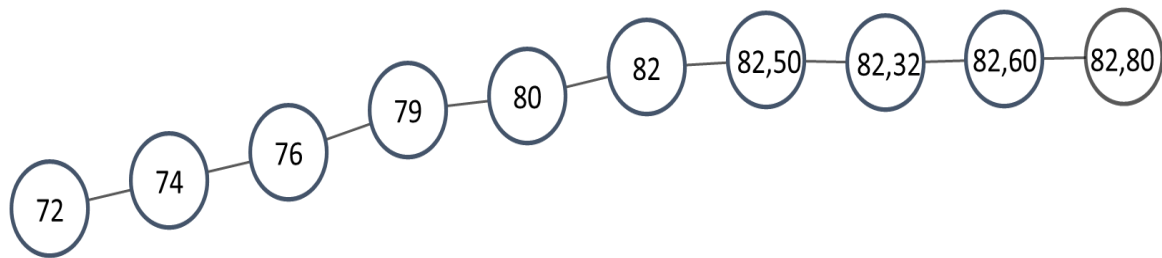
Tabel 2.6
Output Perbaikan Irigasi (Kewenangan Provinsi)

Tahun	Jumlah Lokasi	Output		
		Bendung (bh)	Saluran (m)	Bangunan (bh)
2013	36	4	32.127	89
2014	48	5	41.550	73
2015	55	4	23.500	36
2016	49	2	29.270	28
2017	35	2	12.505	18
2018	30	4	12.349	24
2019	36	4	14.383	15
2020	41	-	1.155	-
2021	21	2	11.515	7
2022	27	1	17.089	18



Grafik 2.6
Manfaat (Outcome) Perbaikan Irigasi Tahun 2013-2022
(dalam satuan hektar)

Melalui optimalisasi operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi, fisik irigasi dalam kondisi baik semakin meningkat menjadi 82,80% di Tahun 2022.



Th 2013 Th 2014 Th 2015 Th 2016 Th 2017 Th 2018 Th 2019 Th 2020 Th 2021 Th 2022

Grafik 2.7

Presentase Kondisi Baik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi

2.2.2.5. Mata Air/Sumber Air.

Jumlah mata air/sumber air se-Jawa Tengah ada 1.455 mata air. Pemanfaatan mata air sebagian besar untuk irigasi pertanian disamping sebagian untuk air baku masyarakat dan perkotaan melalui PDAM.

2.2.2.6. Pantai

Keseluruhan panjang pantai di Jawa Tengah (pantai utara dan pantai selatan) mencapai 828,82 km dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Panjang Pantai di Provinsi Jawa Tengah (meter)

No	Kabupaten	Panjang pantai (Km)
A	Pantai Utara	540,27
1	Brebes	73,00
2	Kota Tegal	8,50
3	Tegal	30,00
4	Pemalang	35,00
5	Pekalongan	8,00
6	Kota Pekalongan	5,70
7	Batang	38,75
8	Kendal	41,00
9	Kota Semarang	36,60
10	Demak	74,00
11	Jepara	66,22
12	Pati	60,00
13	Rembang	63,50
B	Pantai Selatan	288,55
1	Wonogiri	16,90
2	Purworejo	48,54
3	Kebumen	90,48
4	Cilacap	132,63
Total		828,82

2.2.2.7. Kawasan Strategis Provinsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat beberapa kawasan strategis, yaitu :

- Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertahanan keamanan.
- Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi.
- Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

2.2.2.8. Prasarana Kesiapsiagaan Banjir

Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah memiliki prasarana kesiapsiagaan banjir seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Ketersediaan Prasarana Kesiapsiagaan Banjir

No	Pengelola	Unit	Kapasitas	Jumlah
1	Balai PSDA Pemali Comal	Mobile Pump Trailer	150 Lt/dtk	1 buah
			250 Lt/dtk	1 buah
		Mobile Pump Truck	250 Lt/dtk	2 buah
		Pompa Portable (Model Jinjing)		1 buah
		Pompa Portable (Model Trailer)		4 buah
		Motor Vixion		5 buah
2	Balai PSDA Bodri Kuto	Roda 3		1 buah
		Mobile Pump Trailer	150 Lt/dtk	1 buah
		Mobile Pump Truck	250 Lt/dtk	1 buah
		Pompa Portable (Model Trailer)		4 buah
		Motor Vixion		4 buah
3	Balai PSDA Seluna	Roda 3		1 buah
		Mobile Pump Trailer	250 Lt/dtk	1 buah
		Mobile Pump Truck	250 Lt/dtk	1 buah
		Pompa Portable (Model Jinjing)	17 Lt/dtk	1 buah
		Pompa Portable (Model Trailer)	17 Lt/dtk	4 buah
		Motor Vixion		5 buah
4	Balai PSDA Bengawan Solo	Roda 3		1 buah
		Pompa Portable (Model Trailer)	17 Lt/dtk	4 buah
		Motor Vixion		5 buah
5	Balai PSDA Probolo	Roda 3		1 buah
		Motor Vixion		4 buah
		Pompa Portable (Model Trailer)	17Lt/dtk	4 buah
6	Balai PSDA Serayu Citanduy	Roda 3		1 buah
		Motor Vixion		6 buah
		Pompa Portable (Model Trailer)	17Lt/dtk	4 buah
7	Dinas PUSDATARU Prov. Jateng (Kantor Pusat)	Motor Vixion		2 buah
		Pompa Portable (Model Jinjing)	17 Lt/dtk	1 buah
		Mobile Pump Truck	250 Lt/dtk	1 buah
		Mobile Pump Trailer	400 Lt/dtk	1 buah

2.2.2.8. Prasarana Hidroklimatologi

Prasarana penunjang pengelolaan sumber daya air mendukung penyediaan data sumber daya air meliputi jaringan stasiun hidroklimatologi dan fasilitas peralatan telekomunikasi terdiri dari:

- a. Stasiun Klimatologi : 27 buah
- b. Pos Duga Air Sungai : 59 buah
- c. Pos Duga Air Bendung : 175 buah.
- d. Pos Hujan : 739 buah.
- f. Fasilitas telekomunikasi untuk komunikasi Posko banjir

Dalam menunjang program dan kegiatan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah juga mempunyai beberapa alat komunikasi untuk menginformasikan kejadian banjir di Provinsi Jawa Tengah. Daftar alat komunikasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Daftar Alat Komunikasi Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah

No	Instansi	Jumlah Peralatan komunikasi posko banjir (bh)	Jenis
1	Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah	5	Repeater Motorola (1 bh), RIG Motorola (1bh), RIG Icom (2 bh) dan RIG Alinco (1 bh)
2	Balai PSDA Bodri Kuto	15	RIG Alinco (8 bh) dan HT (7 bh)
3	Balai PSDA Pemali Comal	13	RIG Icom (12 bh) dan HT (1 bh)
4	Balai PSDA Serang Lusi Juana	15	RIG Icom (4 bh), RIG Alinco (1 bh) dan HT (10 bh)
5	Balai PSDA Bengawan Solo	6	RIG Alinco (1 bh), RIG Motorola (2 bh), RIG Kenwood (2 bh) dan HT (1 bh).
6	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	3	RIG Motorola (1 bh), RIG Icom (2 bh)
7	Balai PSDA Serayu Citanduy	12	RIG Icom (9 bh), Tait 2000 (2 bh), Alinco DR 135 (1 bh)
Jumlah		69	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah disajikan pada **Tabel 2.10** sedangkan untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah disajikan pada **Tabel 2.11** berikut:

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
A	Tujuan 1																				
	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	-	-	-	80	80	80	80	80	80	80	85	85		100	100,	106,25	106,25		
	Sasaran 1																				
	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	-	-	-	80	80	80	80	80	80	80	85	85		100,	100	106,25	106,25		
	Nilai Sakip PD	Angka	-	-	-	72	74	76	78	80	79,29	80,54	81,68	82,91		110,13	108,84	107,47	106,29		
B	Tujuan 2																				
	Tingkat pelayanan Sumber Daya Air dan penataan ruang	%	-	-	-	62,6	63,87	65,14	66,41	67,69	62,60	63,27	64,06	65,81		100	99,06	98,34	99,10		
	Sasaran 1																				
	Persentase Kualitas sarana dan prasarana sumber daya air	%	-	-	-	53,45	54,24	55,04	55,83	56,62	53,45	53,47	53,79	54,43		99,99	98,58	97,72	97,49		
	Program																				
	Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti	%	-	-	-	21,38	41,51	61,64	81,13	100	21,38	23,27	28,30	45,28		100	56,06	45,91	55,81		
	Persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi	%	-	-	-	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	82,50	82,32	82,60	82,80		100	99,18	98,92	98,57		
	Persentase pemenuhan kebutuhan air baku	%	-	-	-	61,8	62,8	83,5	64,8	65,8	61,80	61,39	61,50	62,00		100	97,75	73,65	95,68		
	Persentase luasan daerah bebas genangan banjir	%	-	-	-	17,28	18,92	20,56	22,19	23,83	17,28	17,95	18,75	20,62		100	94,87	91,20	92,92		
	Persentase sungai dalam kondisi baik	%	-	-	-	52,2	52,24	52,28	52,32	52,36	52,20	52,21	52,29	52,30		100	99,94	100,02	99,96		
	Sasaran 2																				
	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTR			-	-	-	71,75	73,5	75,25	77	78,75	71,75	73,06	74,34	77,19		100,00	99,40	98,78	100,25	
	Program																				
Persentase rencana tata ruang kabupaten/kota yang mendapatkan rekom	%	-	-	-	20,00	40,00	60,00	80,00	100	21,42	33,00	50,14	71,51		107,10	82,50	83,57	89,39			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Gub																			
	Persentase rencana tata ruang provinsi yang tersusun	%	-	-	-	6,67	13,34	20,01	26,68	33,35	6,67	6,67	8,65	21,98		100,00	50,00	43,23	82,38	
	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	-	-	-	71,50	73,00	74,50	76,00	77,50	71,50	72,60	73,67	76,70		100,00	99,45	98,89	100,92	
	Persentase Implementasi Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	%	-	-	-	72,00	73,53	76,00	78,00	80,00	72,00	73,53	75,00	77,68		100,00	100,00	98,68	99,59	

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan	-	-	-	-	-	4.700.000	3.631.421	23.879.778	4.715.000	5.298.614	4.283.617	3.129.308	24.532.150	4.341.882	5.050.000	91,14	86,17	102,73	92,09	95,31	119722,80	153276,60
2	Belanja	247.140.729	263.870.972	279.959.773	297.195.082	319.621.840	308.143.267	142.823.696	191.705.931	236.849.533	261.297.291	289.691.487	130.508.424	180.660.084	221.972.946	250.000.000	94,01	91,38	94,24	93,72	95,68	-	-
3	Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah

2.4.1. Tantangan

Tantangan Dinas PUSDATARU di Provinsi Jawa Tengah semakin berat dan kompleks, beberapa tantangan pada masa depan antara lain :

1. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan kegiatan perekonomian, kebutuhan air semakin meningkat, sementara ketersediaan air cenderung tetap bahkan menurun akibat perubahan tata guna lahan dan perubahan iklim.
2. Menurunnya daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).
3. Intensitas kejadian bencana banjir, rob dan kerusakan pantai akibat cuaca ekstrim dan *land subsidence*.
4. Seluruh infrastruktur yang terbangun harus dipelihara agar tetap berdaya guna untuk meningkatkan nilai manfaat air itu sendiri dan akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
5. Dinamika pembangunan dan pengembangan wilayah, berimplikasi pada penyesuaian pemanfaatan ruang
6. Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*, pengelolaan sumber daya air ke depan menuntut tata kelola yang lebih baik, yang melibatkan tidak hanya peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan, sumber daya manusia (SDM), namun juga faktor lainnya.

2.4.2. Peluang

1. Tersedianya regulasi tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang.
2. Masih adanya potensi sumber daya air yang belum dikelola.
3. Tersedianya Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai se-Jawa Tengah.
4. Potensi dukungan pendanaan dari berbagai sumber yang sah.
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan revisinya, Perda Kawasan Strategis Provinsi (KSP), serta keberadaan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

BAB III
RENSTRA
2024-2026

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah antara lain :

1. Masih tingginya intensitas kejadian banjir/rob yang disebabkan karena cuaca ekstrem, keterbatasan infrastruktur pengendali banjir/rob pada sungai dan pantai.
2. Kerusakan DAS akibat erosi, sedimentasi, pengambilan komoditas tambang dan alih fungsi lahan serta rendahnya partisipasi masyarakat terhadap konservasi SDA.
3. Belum terpenuhinya kebutuhan air baku untuk pertanian, keterbatasan jumlah dan kapasitas tampungan air, serta masih adanya kerusakan dan sedimentasi,
4. Belum optimalnya kinerja jaringan irigasi, masih adanya kerusakan sarpras, kurangnya pengamanan aset, dan rendahnya kapasitas kelembagaan masyarakat pengguna air.
5. Masih adanya ketidaksesuaian substansi RTRW Kab/Kota terhadap dinamika kebijakan
6. Rendahnya ketersediaan RDTR kabupaten/kota sebagai acuan pembangunan
7. Alih fungsi lahan yang disebabkan karena kurangnya pemahaman stakeholders terhadap penyelenggaraan penataan ruang serta kurangnya pengawasan dan penertiban.

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas PUSDATARU

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Tingginya kejadian banjir dan rob	Menurunnya kondisi fisik dan kinerja sungai	1.Terbatasnya sarpras sungai 2.Ketidakesuaian pemanfaatan sempadan sungai 3.Kerusakan tanggul sungai 4.Kurang memadainya OP Sungai
		Abrasi pantai	Terbatasnya infrastruktur pengaman pantai
		Kerusakan DAS	1.Pengambilan komoditas tambang di sungai 2.Alih fungsi lahan 3.Rendahnya partisipasi masyarakat dalam konservasi SDA
		Penurunan permukaan tanah (<i>land subsidence</i>)	1.Eksploitasi air tanah 2.Kondisi geologi batuan 3.Pembebanan berlebih di kawasan pesisir

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2.	Belum terpenuhinya kebutuhan air baku dan irigasi	Rendahnya kapasitas tampungan air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya jumlah tampungan air 2. Kurangnya sebaran tampungan air 3. Sedimentasi dan kerusakan tampungan air
		menurunnya kinerja jaringan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerusakan sarpras jaringan 2. belum optimalnya pengamanan aset 3. Rendahnya Kapasitas Kelembagaan (Petugas OP dan Perkumpulan Petani Pemakai Air)
3.	Keterwujudan RTR masih rendah	Kurang Relevannya RTR sebagai acuan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaksiesuaian substansi RTRW Provinsi terhadap Dinamika Kebijakan 2. Ketidaksiesuaian substansi RTRW Kab/Kota terhadap Dinamika Kebijakan dan rendahnya penyusunan RDTR Kab/Kota 3. Tata Ruang belum dapat mengintervensi usulan rencana pembangunan sektoral 4. Tingginya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan RTR 5. belum adanya kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 6. Rendahnya kualitas data geospasial
		Rendahnya pemahaman Sektoral dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Masyarakat terkait penataan ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman sektoral dan pemerintah kab/kota terkait penataan ruang 2. kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata ruang
		Kurangnya pengawasan penyelenggaraan penataan ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. rendahnya pengawasan penataan ruang 2. rendahnya peran kelembagaan penataan ruang 3. perijinan pemanfaatan ruang belum optimal

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Penyediaan air baku saat ini masih dihadapkan pada beberapa tantangan terkait kuantitas dan kualitas air. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi menuntut ketersediaan air yang terus meningkat. Ketersediaan air baku

melalui sumber permukaan yang terbatas, menyebabkan pemanfaatan air tanah yang berlebihan di beberapa wilayah. Pemanfaatan yang berlebihan ini akhirnya berimplikasi pada menurunnya muka air tanah dan intrusi air laut di beberapa wilayah pesisir.

Di sisi lain, sumber-sumber air permukaan juga dihadapkan pada isu sedimentasi yang tidak hanya mempengaruhi kuantitas, tapi juga kualitas air. Sedimentasi dipengaruhi oleh perubahan (alih fungsi) lahan terutama di daerah hulu. Selain sedimentasi, kualitas air di berbagai sumber air juga dipengaruhi oleh pencemaran yang bersumber dari berbagai kegiatan masyarakat.

Pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan air baku di Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas air permukaan yang cenderung fluktuatif, hal ini disebabkan perubahan iklim global, terjadinya degradasi Daerah Tangkapan Air (DTA), adanya perubahan tata guna lahan dan limbah cair maupun padat yang berasal dari permukiman atau industri yang berpotensi mengurangi kualitas air.

Di sisi lain, sungai yang merupakan aliran terbuka dari air permukaan cenderung mengalami penurunan kondisi fisiknya, disebabkan tingginya laju sedimentasi akibat erosi lahan budidaya sehingga kapasitas alir sungai menjadi berkurang dan belum sepenuhnya dapat menampung debit air di musim penghujan yang berpotensi menimbulkan genangan banjir.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan tersebut, dapat dirumuskan isu strategis pada pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan penataan ruang di Jawa Tengah yaitu

1. Aspek Konservasi Sumber Daya Air :
Berkurangnya tutupan lahan di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai serta Menurunnya kualitas air akibat pencemaran limbah domestik dan industri.
2. Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air :
Penyediaan air untuk irigasi dan air baku, Penurunan fungsi jaringan irigasi serta kekeringan
3. Aspek Pengendalian Daya Rusak Air :
Banjir dan rob, Penambangan galian mineral non logam tanpa ijin di wilayah sungai, Abrasi pantai serta Erosi dan sedimentasi
4. Aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang :
Belum optimalnya ketersediaan rencana tata ruang, implementasi pemanfaatan ruang dan tertib ruang;

BAB IV
RENSTRA
2024-2026

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah

Tujuan

Tujuan Jangka Menengah Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Meningkatkan Pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Sasaran

Sasaran Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah meliputi :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air
2. Meningkatnya Keterwujudan Penataan Ruang
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah
4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal			Target Capaian			Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang		Indeks Pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	Angka	43,47	49,42	57,54	61,81	66,47	71,92	71,92
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Tingkat kualitas Pengelolaan SDA	%	51,81	56,27	60,40	62,06	64,17	66,29	66,29
	Meningkatnya Keterwujudan Penataan Ruang	Persentase keterwujudan penataan ruang	%	35,13	42,58	54,67	61,57	68,76	77,56	77,56
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	31,30	31,36	31,40	31,45	31,50	31,50	31,50
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85	85	85	85	85	85	85
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	3,000	3,131	3,140	3,150	3,160	3,170	3,170

4.2. Manajemen Risiko Strategis Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah

Tabel 4.2.
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis
Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024 - 2026

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Tingkat kualitas Pengelolaan SDA	Menurunnya kinerja sistem irigasi	12	Kerusakan sarpras jaringan irigasi, kurang efektifnya manajemen alokasi air, terbatasnya kapasitas SDM dan kelembagaan	Produktivitas pertanian menurun	Rehabilitasi dan pemeliharaan sarpras jaringan irigasi, Rakor alokasi air, Pembinaan SDM dan kelembagaan	Kepala Dinas	Setiap tahun
		Terbatasnya pemenuhan kebutuhan air baku	12	Kurangnya jumlah sarpras air baku	Tidak terpenuhinya kebutuhan air baku	Membangun embung dan tampungan air lainnya	Kepala Dinas	Setiap tahun
		Menurunnya kondisi fisik sungai kewenangan provinsi	12	Kerusakan sarpras sungai, terbatasnya bangunan pengendali banjir, rendahnya kepedulian masyarakat	Meningkatnya ancaman bencana banjir/rob	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarpras sungai	Kepala Dinas	Setiap tahun
Meningkatnya Keterwujudan Penataan Ruang	Persentase keterwujudan penataan ruang	Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan daerah	12	Terbatasnya Ketersediaan Rencana Tata Ruang (RTR) sebagai acuan pembangunan	Terganggunya aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.	Mendorong kementerian/ lembaga untuk mensinkronkan kebijakan dengan memperhatikan kondisi aktual wilayah kabupaten/kota agar kebijakan dapat diimplementasikan	Kepala Dinas	Setiap Tahun
				Belum optimalnya aspek pengaturan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penataan ruang.	Terganggunya aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.	Mengoptimalkan koordinasi antar sektor dalam perencanaan pemanfaatan ruang sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan	Kepala Dinas	Setiap Tahun
				Kurangnya pemahaman SDM pemerintah daerah dibidang penataan ruang	Terganggunya aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.	Penguatan kapasitas SDM melalui sosialisasi, bimtek, seminar, dan workshop.	Kepala Dinas	Setiap Tahun

BAB V
RENSTRA
2024-2026

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah

Strategi Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah dalam 3 tahun mendatang (tahun 2024-2026) meliputi :

1. Meningkatkan kinerja sistem jaringan irigasi
2. Meningkatkan kondisi fisik sungai
3. Mengurangi dampak daya rusak air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pesisir pantai (kewenangan)
4. Meningkatkan ketercapaian pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah
5. Meningkatkan ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah

Arah Kebijakan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah merupakan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Penataan Ruang sebagai arahan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari :

1. Menyusun Pola dan Rencana Pengelolaan SDA;
2. Melaksanakan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan SDA;
3. Mengelola Hidrologi dan Kualitas Air WS;
4. Menyusun Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya;
5. Membangun Embung dan Penampung Air Lainnya;
6. Merehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya;
7. Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya;
8. Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi;
9. Melaksanakan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi;
10. Menyusun Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa;
11. Merehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan;
12. Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan;
13. Menyusun Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Perkotaan dan Pengaman Pantai
14. Membangun Bangunan Perkuatan Tebing;
15. Membangun Check Dam;
16. Melaksanakan Normalisasi/Restorasi Sungai;
17. Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai;
18. Membangun Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya;
19. Melaksanakan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi;

20. Peningkatan Pemahaman Sektoral dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait Penataan Ruang;
21. Peningkatan Pemahaman masyarakat terkait penataan ruang;
22. Penyesuaian substansi RTRWP dengan dinamika Kebijakan;
23. Melaksanakan Kajian-Kajian dalam rangka revisi RTRWP;
24. Melaksanakan Evaluasi rancangan perda/perkada tentang RTR Kab/Kota;
25. Mendorong Intervensi Tata Ruang dalam penyusunan rencana pemb sektoral
26. Melaksanakan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang ;
27. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang;
28. Melaksanakan penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang;
29. Meningkatkan kualitas data geospasial;
30. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
31. Peningkatan koordinasi kelembagaan penataan ruang ;
32. Optimalisasi perijinan pemanfaatan ruang;
33. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi;
34. Peningkatan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah dalam 3 tahun mendatang dituangkan pada tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air	Pemenuhan kebutuhan air baku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Pola dan Rencana Pengelolaan SDA 2. Melaksanakan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA 3. Mengelola Hidrologi dan Kualitas Air WS 4. Menyusun Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 5. Membangun Embung dan Penampung Air Lainnya 6. Merehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 7. Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 8. Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 9. Melaksanakan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan kinerja jaringan irigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 2. Merehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 3. Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 4. Melaksanakan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
			Meningkatkan kondisi fisik sungai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Perkotaan dan Pengaman Pantai 2. Membangun Bangunan Perkuatan Tebing 3. Membangun Check Dam 4. Melaksanakan Normalisasi/Restorasi Sungai 5. Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
			Mengurangi dampak daya rusak air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pesisir pantai (kewenangan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 2. Melaksanakan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
		Meningkatnya Keterwujudan Penataan Ruang	Meningkatkan pemahaman sektoral dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pemahaman Sektoral dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait Penataan Ruang 2. Peningkatan Pemahaman masyarakat terkait penataan ruang
			Mendorong RTR sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian substansi RTRWP dengan dinamika Kebijakan 2. Melaksanakan Kajian-Kajian dalam rangka revisi RTRWP 3. Melaksanakan Evaluasi rancangan perda/perkada tentang RTR Kabupaten/Kota 4. Mendorong Intervensi Tata Ruang dalam penyusunan rencana pemb sektoral 5. Melaksanakan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang 7. Melaksanakan penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 8. Meningkatkan kualitas data geospasial
			Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang 2. Peningkatan koordinasi kelembagaan penataan ruang 3. Optimalisasi perijinan pemanfaatan ruang

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Meningkatkan ketercapaian pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Peningkatan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah

BAB VI
RENSTRA
2024-2026

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Serta Pendanaan 2024-2026 Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah

Dalam bab ini memuat indikator kinerja Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah yang merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan. Selain IKU Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang merujuk pada indikator program. Indikator kinerja ditampilkan dalam tabel berikut :

Dalam bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif APBD Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah. Program dan kegiatan harus telah diselaraskan dengan target tujuan dan sasaran OPD. Rincian program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif ditampilkan dalam tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
TOTAL ANGGARAN DINAS PUSDATARU								284.582.931.000		240.611.402.000		265.034.658.000		790.228.991.000		
Meningkatkan Pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah								188.757.726.000		148.088.598.000		172.026.453.000		508.872.777.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
				Indeks Pelayanan Sumberdaya Air dan Penataan Ruang	Angka	49,42	61,81	188.757.726.000		148.088.598.000	66,47	172.026.453.000	71,92	508.872.777.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air *							183.087.726.000		142.338.598.000		166.275.591.000		491.701.915.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
				Persentase tingkat kualitas pengelolaan sumberdaya air *	%	56,27	62,06	183.087.726.000		142.338.598.000	64,18	166.275.591.000	66,29	491.701.915.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) **					183.087.726.000		142.338.598.000		166.275.591.000		491.701.915.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase penyediaan rencana teknis terhadap rencana pembangunan infrastruktur sumberdaya air **	%	44,03	61,9	11.662.848.000	67,29	14.422.375.000	72,61	15.922.375.000	72,61	42.007.598.000	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis	
		1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota ***					2.240.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000		6.840.000.000		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana Irigasi ***	Dokumen	6	3	2.240.000.000	3	2.300.000.000	3	2.300.000.000	9	6.840.000.000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	
		1.03.02.1.02.032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa ****					2.240.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000		6.840.000.000		
				Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun ****	Dokumen	6	3	2.240.000.000	3	2.300.000.000	3	2.300.000.000	9	6.840.000.000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis; JAWA TENGAH
		1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota ***					9.422.848.000		12.122.375.000		13.622.375.000		35.167.598.000		
				Jumlah Data Sistem Hidrologi dan Kualitas Air pendukung Perencanaan Dan Pengembangan Teknis Sarana Prasarana SDA ***	Dokumen	6	6	1.624.274.000	6	1.624.274.000	6	1.624.274.000	18	4.872.822.000	SEKSI HIDROLOGI DAN SISTEM INFORMASI	
		1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi ****					1.174.274.000		1.174.274.000		1.174.274.000		3.522.822.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi ****	Dokumen	6	3	1.174.274.000	3	1.174.274.000	3	1.174.274.000	9	3.522.822.000	SEKSI HIDROLOGI DAN SISTEM INFORMASI	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis; JAWA TENGAH
		1.03.02.1.01.0104	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) ****					450.000.000		450.000.000		450.000.000		1.350.000.000		
				Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan ****	Unit	2	3	450.000.000	3	450.000.000	3	450.000.000	9	1.350.000.000	SEKSI HIDROLOGI DAN SISTEM INFORMASI	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis; JAWA TENGAH
				Jumlah dokumen pengembangan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan provinsi ***	Dokumen	5	14	2.188.574.000	15	3.350.000.000	16	3.850.000.000	45	9.388.574.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi ****					638.574.000		800.000.000		800.000.000		2.238.574.000		
				Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun ****	Dokumen	2	11	638.574.000	11	800.000.000	11	800.000.000	33	2.238.574.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis; JAWA TENGAH
		1.03.02.1.01.0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi ****					1.550.000.000		2.550.000.000		3.050.000.000		7.150.000.000		
				Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun ****	Dokumen	3	3	1.550.000.000	4	2.550.000.000	5	3.050.000.000	12	7.150.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana SDA ***	Dokumen	11	5	5.610.000.000	6	7.148.101.000	6	8.148.101.000	17	20.906.202.000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	
		1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya ****					3.350.000.000		2.000.000.000		2.500.000.000		7.850.000.000		
				Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun ****	Dokumen	4	3	3.350.000.000	3	2.000.000.000	3	2.500.000.000	9	7.850.000.000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis; JAWA TENGAH
		1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai ****					2.260.000.000		5.148.101.000		5.648.101.000		13.056.202.000		
				Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai ****	Dokumen	7	2	2.260.000.000	3	5.148.101.000	3	5.648.101.000	8	13.056.202.000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis; JAWA TENGAH
				Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Pemali Comal **	%	100	100	3.847.324.000	100	3.847.324.000	100	3.847.324.000	100	11.541.972.000	Balai PSDA Pemali Comal	
		1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota ***					3.847.324.000		3.847.324.000		3.847.324.000		11.541.972.000		
				Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA ***	Dokumen	3	5	3.847.324.000	5	3.847.324.000	5	3.847.324.000	15	11.541.972.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi ****					3.847.324.000		3.847.324.000		3.847.324.000		11.541.972.000		
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal ****	Dokumen	3	5	3.847.324.000	5	3.847.324.000	5	3.847.324.000	15	11.541.972.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	Balai PSDA Pemali Comal; JAWA TENGAH
				Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto **	%	100	100	2.444.996.000	100	2.444.996.000	100	2.444.996.000	100	7.334.988.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
		1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota ***					2.444.996.000		2.444.996.000		2.444.996.000		7.334.988.000		
				Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA ***	Dokumen	3	5	2.444.996.000	5	2.444.996.000	5	2.444.996.000	15	7.334.988.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi ****					2.444.996.000		2.444.996.000		2.444.996.000		7.334.988.000		
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto ****	Dokumen	3	5	2.444.996.000	5	2.444.996.000	5	2.444.996.000	15	7.334.988.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	Balai PSDA Bodri Kuto; JAWA TENGAH
				Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana **	%	100	100	2.761.321.000	100	2.761.321.000	100	2.761.321.000	100	8.283.963.000	Balai PSDA Serang Lusi Juana	
		1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota ***					2.761.321.000		2.761.321.000		2.761.321.000		8.283.963.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA ***	Dokumen	3	5	2.761.321.000	5	2.761.321.000	5	2.761.321.000	15	8.283.963.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi ****					2.761.321.000		2.761.321.000		2.761.321.000		8.283.963.000		
				Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA di Wilayah BPSDA Serang Lusi Juana ****	Dokumen	3	5	2.761.321.000	5	2.761.321.000	5	2.761.321.000	15	8.283.963.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	Balai PSDA Serang Lusi Juana; JAWA TENGAH
				Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo **	%	100	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	9.000.000.000	Balai PSDA Bengawan Solo	
		1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota ***					3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		9.000.000.000		
				Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA ***	Dokumen	3	5	3.000.000.000	5	3.000.000.000	5	3.000.000.000	15	9.000.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi ****					3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		9.000.000.000		
				Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA di Wilayah BPSDA Bengawan Solo ****	Dokumen	3	5	3.000.000.000	5	3.000.000.000	5	3.000.000.000	15	9.000.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	Balai PSDA Bengawan Solo; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo **	%	100	100	1.847.037.000	100	1.847.037.000	100	1.847.037.000	100	5.541.111.000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	
		1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota ***					1.847.037.000		1.847.037.000		1.847.037.000		5.541.111.000		
				Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA ***	Dokumen	3	5	1.847.037.000	5	1.847.037.000	5	1.847.037.000	15	5.541.111.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi ****					1.847.037.000		1.847.037.000		1.847.037.000		5.541.111.000		
				Jumlah Dokumen laporan pengendalian dan pendayagunaan SDA di BPSDA Progo Bogowonto Luk Ulo ****	Dokumen	3	5	1.847.037.000	5	1.847.037.000	5	1.847.037.000	15	5.541.111.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo; JAWA TENGAH
				Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy **	%	100	100	3.070.395.000	100	3.070.395.000	100	3.070.395.000	100	9.211.185.000	Balai PSDA Serayu Citanduy.	
		1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota ***					3.070.395.000		3.070.395.000		3.070.395.000		9.211.185.000		
				Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA ***	Dokumen	3	5	3.070.395.000	5	3.070.395.000	5	3.070.395.000	15	9.211.185.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Targe t	Rp		
							Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi ****					3.070.395.000		3.070.395.000		3.070.395.000		9.211.185.000		
				Jumlah Dokumen laporan pengendalian dan pendayagunaan SDA di BPSDA Serayu Citanduy ****	Dokumen	3	5	3.070.395.000	5	3.070.395.000	5	3.070.395.000	15	9.211.185.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	Balai PSDA Serayu Citanduy.; JAWA TENGAH
				Indeks kinerja sistem irigasi **	Angka	68,68	69,14	27.500.000.000	69,31	21.768.096.000	69,49	22.535.089.000	69,49	71.803.185.000	Bidang Irigasi dan Air Baku	
		1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota ***					27.500.000.000		21.768.096.000		22.535.089.000		71.803.185.000		
				Jumlah DI yang direhab ***	Unit	27	30	27.000.000.000	27	21.268.096.000	28	22.000.000.000	85	70.268.096.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	
		1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan ****					27.000.000.000		21.268.096.000		22.000.000.000		70.268.096.000		
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi ****	Km	4,7646	7,25	27.000.000.000	8,15	21.268.096.000	8,3	22.000.000.000	23,7	70.268.096.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	Bidang Irigasi dan Air Baku; JAWA TENGAH
				Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja sistem irigasi kewenangan provinsi ***	Dokumen	4	3	500.000.000	3	500.000.000	3	535.089.000	9	1.535.089.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi ****					500.000.000		500.000.000		535.089.000		1.535.089.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air ****	Unit	4	3	350.000.000	3	350.000.000	3	385.089.000	9	1.085.089.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	Bidang Irigasi dan Air Baku; JAWA TENGAH
				Jumlah Kelembagaan Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan ****	Unit	2	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	Bidang Irigasi dan Air Baku; JAWA TENGAH
				Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal **	Angka	62,64	62,7	7.917.146.000	62,73	7.917.146.000	62,76	7.987.146.000	62,76	23.821.438.000	Balai PSDA Pemali Comal	
		1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota ***					7.917.146.000		7.917.146.000		7.987.146.000		23.821.438.000		
				Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal ***	%	62,64	60,33	7.917.146.000	60,36	7.917.146.000	60,39	7.987.146.000	60,39	23.821.438.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan ****					7.917.146.000		7.917.146.000		7.987.146.000		23.821.438.000		
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal ****	Km	202,39	202,39	7.917.146.000	202,39	7.917.146.000	202,39	7.987.146.000	607,17	23.821.438.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	Balai PSDA Pemali Comal; JAWA TENGAH
				Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto **	Angka	71,78	71,82	6.657.738.000	71,84	5.898.115.000	71,86	5.968.115.000	71,86	18.523.968.000	Balai PSDA Bodri Kuto	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota ***					6.657.738.00		5.898.115.00		5.968.115.00		18.523.968.00		
				Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto ***	%	70,21	70,24	6.657.738.00		5.898.115.00		5.968.115.00	70,28	18.523.968.00	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan ****					6.657.738.00		5.898.115.00		5.968.115.00		18.523.968.00		
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto ****	Km	11,804	15,55	6.657.738.00		5.898.115.00	21,7	5.968.115.00	34,8	18.523.968.00	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	Balai PSDA Bodri Kuto; JAWA TENGAH
				Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana **	Angka	62,55	62,95	4.738.658.00		4.738.658.00	63,15	4.808.658.00	63,35	14.285.974.00	Balai PSDA Serang Lusi Juana	
		1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota ***					4.738.658.00		4.738.658.00		4.808.658.00		14.285.974.00		
				Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Serang Lusi Juana ***	%	59,07	59,13	4.738.658.00		4.738.658.00	59,16	4.808.658.00	59,19	14.285.974.00	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan ****					4.738.658.00		4.738.658.00		4.808.658.00		14.285.974.00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana ****	Km	156,787	156,787	4.738.658.000	156,787	4.738.658.000	156,787	4.808.658.000	470,361	14.285.974.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	Balai PSDA Serang Lusi Juana; JAWA TENGAH
				Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo **	Angka	67,27	67,35	7.599.585.000	67,39	7.599.585.000	67,43	7.669.585.000	67,43	22.868.755.000	Balai PSDA Bengawan Solo	
		1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota ***					7.599.585.000		7.599.585.000		7.669.585.000		22.868.755.000		
				Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Bengawan Solo ***	%	72,96	72,99	7.599.585.000	73,01	7.599.585.000	73,03	7.669.585.000	73,03	22.868.755.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan ****					7.599.585.000		7.599.585.000		7.669.585.000		22.868.755.000		
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di wilayah BPSDA Bengawan Solo ****	Km	6,145	6,58	7.599.585.000	8,4	7.599.585.000	9,77	7.669.585.000	24,75	22.868.755.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	Balai PSDA Bengawan Solo; JAWA TENGAH
				Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo **	Angka	77,32	77,36	4.464.329.000	77,38	4.464.329.000	77,4	4.534.329.000	77,4	13.462.987.000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	
		1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota ***					4.464.329.000		4.464.329.000		4.534.329.000		13.462.987.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Progo Bogowonto Luk Ulo ***	%	57	63	4.464.329.000	66	4.464.329.000	69	4.534.329.000	69	13.462.987.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan ****					4.464.329.000		4.464.329.000		4.534.329.000		13.462.987.000		
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo ****	Km	131,38	134,51	4.464.329.000	134,51	4.464.329.000	134,51	4.534.329.000	403,53	13.462.987.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo; JAWA TENGAH
				Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy **	Angka	70,51	72,65	5.215.557.000	73,37	5.215.557.000	74,11	5.285.557.000	74,11	15.716.671.000	Balai PSDA Serayu Citanduy.	
		1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota ***					5.215.557.000		5.215.557.000		5.285.557.000		15.716.671.000		
				Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Serayu Citanduy ***	%	70,51	72,65	5.215.557.000	73,37	5.215.557.000	74,11	5.285.557.000	74,11	15.716.671.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan ****					5.215.557.000		5.215.557.000		5.285.557.000		15.716.671.000		
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy. ****	Km	191	191,8	5.215.557.000	191,8	5.215.557.000	191,8	5.285.557.000	575,4	15.716.671.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	Balai PSDA Serayu Citanduy.; JAWA TENGAH
				Persentase embung dan penampung air lainnya kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik **	%	60,04	64,79	10.734.241.000	67,68	10.947.241.000	70,58	11.447.241.000	70,58	33.128.723.000	Bidang Irigasi dan Air Baku	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota ***					10.734.241.000		10.947.241.000		11.447.241.000		33.128.723.000		
				Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kondisi fisik tampungan air yang terbangun ***	Dokumen	2	2	134.241.000	2	147.241.000	2	147.241.000	6	428.723.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi ****					134.241.000		147.241.000		147.241.000		428.723.000		
				Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan ****	Unit	2	1	134.241.000	1	147.241.000	1	147.241.000	3	428.723.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	Bidang Irigasi dan Air Baku; JAWA TENGAH
				jumlah laporan peningkatan kapasitas lembaga pengelolaan SDA dan laporan kerjasama dan pengelolaan aset ***	Dokumen	4	4	1.700.000.000	4	1.800.000.000	4	1.800.000.000	12	5.300.000.000	SEKSI KERJASAMA DAN MANAJEMEN ASET	
		1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi ****					1.700.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		5.300.000.000		
				Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya ****	Unit	2	2	700.000.000	2	800.000.000	2	800.000.000	6	2.300.000.000	SEKSI KERJASAMA DAN MANAJEMEN ASET	Bidang Irigasi dan Air Baku; JAWA TENGAH
				Jumlah laporan kerjasama dan pengelolaan aset ****	Laporan	2	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	6	3.000.000.000	SEKSI KERJASAMA DAN MANAJEMEN ASET	Bidang Irigasi dan Air Baku; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Total Bangunan Embung dan penampung air lainnya yang terbangun ***	Unit	92	94	8.900.000.000	95	9.000.000.000	96	9.500.000.000	285	27.400.000.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	
		1.03.02.1.01.0078	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya ****					4.400.000.000		4.500.000.000		5.000.000.000		13.900.000.000		
				Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi ****	Unit	4	4	4.400.000.000	5	4.500.000.000	5	5.000.000.000	14	13.900.000.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	Bidang Irigasi dan Air Baku; JAWA TENGAH
		1.03.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya ****					4.500.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000		13.500.000.000		
				Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun ****	Unit	1	1	4.500.000.000	1	4.500.000.000	1	4.500.000.000	3	13.500.000.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	Bidang Irigasi dan Air Baku; JAWA TENGAH
				Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Pemali **	%	34,78	34,79	764.865.000	34,8	764.865.000	34,81	764.865.000	34,81	2.294.595.000	Balai PSDA Pemali Comal	
		1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota ***					764.865.000		764.865.000		764.865.000		2.294.595.000		
				Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal ***	%	34,78	100	764.865.000	100	764.865.000	100	764.865.000	100	2.294.595.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya ****					764.865.000		764.865.000		764.865.000		2.294.595.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal ****	Unit	21	22	764.865.000	22	764.865.000	22	764.865.000	66	2.294.595.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	Balai PSDA Pemali Comal; JAWA TENGAH
				Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto **	%	36,3636	54,55	348.909.000	63,64	360.090.000	72,73	360.090.000	72,73	1.069.089.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
		1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota ***					348.909.000		360.090.000		360.090.000		1.069.089.000		
				Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto ***	%	9,09	9,09	348.909.000	9,09	360.090.000	9,09	360.090.000	9,09	1.069.089.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya ****					348.909.000		360.090.000		360.090.000		1.069.089.000		
				Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto ****	Unit	1	1	348.909.000	1	360.090.000	1	360.090.000	3	1.069.089.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	Balai PSDA Bodri Kuto; JAWA TENGAH
				Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana **	%	47,06	52,94	831.930.000	58,82	831.930.000	64,71	831.930.000	64,71	2.495.790.000	Balai PSDA Serang Lusi Juana	
		1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota ***					831.930.000		831.930.000		831.930.000		2.495.790.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana ***	%	15	15	831.930.000	15	831.930.000	15	831.930.000	15	2.495.790.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya ****				831.930.000		831.930.000		831.930.000		831.930.000	2.495.790.000		
				Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana ****	Unit	3	3	831.930.000	3	831.930.000	3	831.930.000	9	2.495.790.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	Balai PSDA Serang Lusi Juana; JAWA TENGAH
				Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo **	%	77,74	77,78	873.365.000	77,8	873.365.000	77,82	873.365.000	77,82	2.620.095.000	Balai PSDA Bengawan Solo	
		1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota ***				873.365.000		873.365.000		873.365.000		873.365.000	2.620.095.000		
				Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo ***	%	27,78	33,33	873.365.000	27,78	873.365.000	27,78	873.365.000	27,78	2.620.095.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya ****				873.365.000		873.365.000		873.365.000		873.365.000	2.620.095.000		
				Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo ****	Unit	5	5	873.365.000	5	873.365.000	5	873.365.000	15	2.620.095.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	Balai PSDA Bengawan Solo; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo **	%	92,17	92,21	254.749.000	92,23	254.749.000	92,25	254.749.000	92,25	764.247.000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	
		1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota ***					254.749.000		254.749.000		254.749.000		764.247.000		
				Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo ***	%	100	100	254.749.000	100	254.749.000	100	254.749.000	100	764.247.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya ****					254.749.000		254.749.000		254.749.000		764.247.000		
				Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo ****	Unit	2	2	254.749.000	2	254.749.000	2	254.749.000	6	764.247.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo; JAWA TENGAH
				Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy **	%	72,11	76,5	279.235.000	78,79	279.235.000	81,15	279.235.000	81,15	837.705.000	Balai PSDA Serayu Citanduy.	
		1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota ***					279.235.000		279.235.000		279.235.000		837.705.000		
				Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy ***	%	10	10	279.235.000	10	279.235.000	10	279.235.000	10	837.705.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Targe t	Rp		
							Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya ****					279.235.000		279.235.000		279.235.000		837.705.000		
				Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy ****	Unit	1	1	279.235.000	1	279.235.000	1	279.235.000	3	837.705.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	Balai PSDA Serayu Citanduy.; JAWA TENGAH
				Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi **	%	52,32	52,4	64.792.510.000	52,44	26.802.759.000	52,48	47.552.759.000	52,48	139.148.028.000	Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai	
		1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota ***					64.792.510.000		26.802.759.000		47.552.759.000		139.148.028.000		
				akumulasi panjang sarpras sungai pantai terbangun ***	Km	20,9	6,4	54.250.000.000	5,865	16.250.000.000	5,9	37.000.000.000	18,165	107.500.000.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	
		1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai ****					1.250.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000		3.750.000.000		
				Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi ****	Km	12,7	2,8	1.250.000.000	3	1.250.000.000	3	1.250.000.000	8,8	3.750.000.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai; JAWA TENGAH
		1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya ****					18.000.000.000		-		10.750.000.000		28.750.000.000		
				Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun ****	Km	1	1	18.000.000.000	1,3	-	1,3	10.750.000.000	3,6	28.750.000.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		1.03.02.1.01.0102	Pembangunan Check Dam ****					12.000.000.000		-		-		12.000.000.000		
				Jumlah Check Dam yang Dibangun ****	Unit	0	1	12.000.000.000	0	-	0	-	1	12.000.000.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai; JAWA TENGAH
		1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing ****					23.000.000.000		15.000.000.000		25.000.000.000		63.000.000.000		
				Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun ****	Km	7,2	1,4	23.000.000.000	1,565	15.000.000.000	1,6	25.000.000.000	4,565	63.000.000.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai; JAWA TENGAH
				Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA ***	Kegiatan	1	1	742.510.000	1	752.759.000	1	752.759.000	3	2.248.028.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi ****					742.510.000		752.759.000		752.759.000		2.248.028.000		
				Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan ****	Unit	4	4	742.510.000	4	752.759.000	4	752.759.000	12	2.248.028.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai; JAWA TENGAH
				Panjang penanganan darurat sarpras sungai yang rusak akibat banjir ***	Km	2,81	2	9.800.000.000	2	9.800.000.000	2	9.800.000.000	6	29.400.000.000	SEKSI PENANGGULANGAN BANJIR DAN PERALATAN	
		1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai ****					9.800.000.000		9.800.000.000		9.800.000.000		29.400.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara ****	Km	2,81	2	9.800.000.000	2	9.800.000.000	2	9.800.000.000	6	29.400.000.000	SEKSI PENANGGULANGAN BANJIR DAN PERALATAN	Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai; JAWA TENGAH
				Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Pemali Comal **	%	53,22	53,28	7.444.351.000	53,32	7.444.351.000	53,36	7.444.351.000	53,36	22.333.053.000	Balai PSDA Pemali Comal	
		1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota ***					7.444.351.000		7.444.351.000		7.444.351.000		22.333.053.000		
				Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA Pemali Comal ***	%	53,22	100	7.444.351.000	100	7.444.351.000	100	7.444.351.000	100	22.333.053.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai ****					7.444.351.000		7.444.351.000		7.444.351.000		22.333.053.000		
				Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara ****	Km	10,75	6,45	7.444.351.000	6,45	7.444.351.000	6,45	7.444.351.000	19,35	22.333.053.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	Balai PSDA Pemali Comal; JAWA TENGAH
				Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Bodri Kuto **	%	49,97	50,06	4.036.637.000	50,1	4.785.079.000	50,14	4.785.079.000	50,14	13.606.795.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
		1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota ***					4.036.637.000		4.785.079.000		4.785.079.000		13.606.795.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Targe t	Rp		
							Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto ***	%	100	100	4.036.637.000	100	4.785.079.000	100	4.785.079.000	100	13.606.795.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai ****					4.036.637.000		4.785.079.000		4.785.079.000		13.606.795.000		
				Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto ****	Km	7	3,53	4.036.637.000	4,98	4.785.079.000	5,25	4.785.079.000	13,76	13.606.795.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	Balai PSDA Bodri Kuto; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Keterwujudan dan Penataan Ruang *							5.670.000.000		5.750.000.000		5.750.862.000		17.170.862.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
				Persentase keterwujudan penataan ruang *	%	42,58	61,57	5.670.000.000	68,76	5.750.000.000	77,56	5.750.862.000	77,56	17.170.862.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG **					5.670.000.000		5.750.000.000		5.750.862.000		17.170.862.000		
				Persentase ketersediaan rencana tata ruang **	%	46,75	60,71	1.970.000.000	69,29	2.050.000.000	77,67	2.050.000.000	77,67	6.070.000.000	Bidang Penataan Ruang	
		1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi ***					1.120.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		3.520.000.000		
				Jumlah dokumen perencanaan tata ruang ***	Dokumen	1	3	1.120.000.000	2	1.200.000.000	2	1.200.000.000	7	3.520.000.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		1.03.12.1.01.006	Penetapan RTRW Provinsi ****					920.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		2.920.000.000		
				Jumlah Dokumen Arahan Pengembangan Wilayah ****	Dokumen	0	1	720.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	3	2.720.000.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	Bidang Penataan Ruang; JAWA TENGAH
				Jumlah Perda RTRW Provinsi ****	Dokumen	0	1	200.000.000	0	-	0	-	1	200.000.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	Bidang Penataan Ruang; JAWA TENGAH
		1.03.12.1.01.009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang ****					200.000.000		200.000.000		200.000.000		600.000.000		
				Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi ****	Orang	0	300	200.000.000	300	200.000.000	300	200.000.000	900	600.000.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	Bidang Penataan Ruang; JAWA TENGAH
		1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang ***					850.000.000		850.000.000		850.000.000		2.550.000.000		
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang ***	Dokumen	15	11	850.000.000	11	850.000.000	11	850.000.000	33	2.550.000.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	
		1.03.12.1.02.008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota ****					700.000.000		700.000.000		700.000.000		2.100.000.000		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota ****	Laporan	12	10	700.000.000	10	700.000.000	10	700.000.000	30	2.100.000.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	Bidang Penataan Ruang; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025		2026		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		1.03.12.1.02.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi ****					150.000.000		150.000.000		150.000.000		450.000.000			
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi ****	Dokumen	0	1	150.000.000		150.000.000	1	150.000.000		3	450.000.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	Bidang Penataan Ruang; JAWA TENGAH
				Persentase implementasi pemanfaatan ruang **	%	60	68	1.000.000.000		76	1.000.000.000	88	1.000.000.000	88	3.000.000.000	Bidang Penataan Ruang	
		1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi ***					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		3.000.000.000			
				Jumlah dokumen implementasi pelaksanaan pemanfaatan ruang ***	Dokumen	2	6	1.000.000.000		1.000.000.000	6	1.000.000.000		18	3.000.000.000	SEKSI PEMANFAATAN RUANG	
		1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang ****					700.000.000		700.000.000		700.000.000		2.100.000.000			
				Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang ****	Laporan	2	4	700.000.000		700.000.000	4	700.000.000		12	2.100.000.000	SEKSI PEMANFAATAN RUANG	Bidang Penataan Ruang; JAWA TENGAH
		1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang ****					300.000.000		300.000.000		300.000.000		900.000.000			
				Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang ****	Dokumen	0	2	300.000.000		300.000.000	2	300.000.000		6	900.000.000	SEKSI PEMANFAATAN RUANG	Bidang Penataan Ruang; JAWA TENGAH
				Persentase tertib ruang **	%	21	56	2.217.612.000		61	2.217.612.000	67	2.217.612.000	67	6.652.836.000	Bidang Penataan Ruang	
		1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi ***					1.766.693.000		1.766.693.000		1.766.693.000		5.300.079.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang ***	Dokumen	3	5	1.766.693.000	5	1.766.693.000	5	1.766.693.000	15	5.300.079.000	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	
		1.03.12.1.04.004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang ****					1.766.693.000		1.766.693.000		1.766.693.000		5.300.079.000		
				Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang ****	Dokumen	3	5	1.766.693.000	5	1.766.693.000	5	1.766.693.000	15	5.300.079.000	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Bidang Penataan Ruang; JAWA TENGAH
		1.03.12.4.06	Pengawasan Penataan Ruang ***					450.919.000		450.919.000		450.919.000		1.352.757.000		
				Jumlah dokumen pengawasan penataan ruang ***	Dokumen	0	2	450.919.000	2	450.919.000	2	450.919.000	6	1.352.757.000	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	
		1.03.12.4.06.001	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat ****					269.859.000		269.859.000		269.859.000		809.577.000		
				Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Dokumen Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat ****	Dokumen	0	1	269.859.000	1	269.859.000	1	269.859.000	3	809.577.000	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Bidang Penataan Ruang; Wilayah Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		1.03.12.4.06.003	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan ****					181.060.000		181.060.000		181.060.000		543.180.000		
				Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan ****	Dokumen	0	1	181.060.000	1	181.060.000	1	181.060.000	3	543.180.000	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Bidang Penataan Ruang; Wilayah Jawa Tengah, JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal **	%	100	100	97.638.000	100	97.638.000	100	97.750.000	100	293.026.000	Balai PSDA Pemali Comal	
		1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi ***					97.638.000		97.638.000		97.750.000		293.026.000		
				Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal ***	Dokumen	1	1	97.638.000	1	97.638.000	1	97.750.000	3	293.026.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAN	
		1.03.12.1.04.004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang ****					97.638.000		97.638.000		97.750.000		293.026.000		
				Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang ****	Dokumen	1	1	97.638.000	1	97.638.000	1	97.750.000	3	293.026.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAN	Balai PSDA Pemali Comal; JAWA TENGAH
				Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto **	%	100	100	96.321.000	100	96.321.000	100	96.500.000	100	289.142.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
		1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi ***					96.321.000		96.321.000		96.500.000		289.142.000		
				Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto ***	Dokumen	1	1	96.321.000	1	96.321.000	1	96.500.000	3	289.142.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAN	
		1.03.12.1.04.004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang ****					96.321.000		96.321.000		96.500.000		289.142.000		
				Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto ****	Dokumen	1	1	96.321.000	1	96.321.000	1	96.500.000	3	289.142.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAN	Balai PSDA Bodri Kuto; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana **	%	100	100	76.171.000	100	76.171.000	100	76.250.000	100	228.592.000	Balai PSDA Serang Lusi Juana	
		1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi ***					76.171.000		76.171.000		76.250.000		228.592.000		
				Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana ***	Dokumen	1	1	76.171.000	1	76.171.000	1	76.250.000	3	228.592.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAN	
		1.03.12.1.04.004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang ****					76.171.000		76.171.000		76.250.000		228.592.000		
				Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana ****	Dokumen	1	1	76.171.000	1	76.171.000	1	76.250.000	3	228.592.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAN	Balai PSDA Serang Lusi Juana; JAWA TENGAH
				Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo **	%	100	100	72.097.000	100	72.097.000	100	72.250.000	100	216.444.000	Balai PSDA Bengawan Solo	
		1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi ***					72.097.000		72.097.000		72.250.000		216.444.000		
				Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo ***	Dokumen	1	1	72.097.000	1	72.097.000	1	72.250.000	3	216.444.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAN	
		1.03.12.1.04.004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang ****					72.097.000		72.097.000		72.250.000		216.444.000		
				Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo ****	Dokumen	1	1	72.097.000	1	72.097.000	1	72.250.000	3	216.444.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAN	Balai PSDA Bengawan Solo; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo **	%	100	100	72.961.000	100	72.961.000	100	73.000.000	100	218.922.000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	
		1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi ***					72.961.000		72.961.000		73.000.000		218.922.000		
				Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo ***	Dokumen	1	1	72.961.000	1	72.961.000	1	73.000.000	3	218.922.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAN	
		1.03.12.1.04.004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang ****					72.961.000		72.961.000		73.000.000		218.922.000		
				Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai Progo Bogowonto Luk Ulo ****	Dokumen	1	1	72.961.000	1	72.961.000	1	73.000.000	3	218.922.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAN	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo; JAWA TENGAH
				Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy **	%	100	100	67.200.000	100	67.200.000	100	67.500.000	100	201.900.000	Balai PSDA Serayu Citanduy.	
		1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi ***					67.200.000		67.200.000		67.500.000		201.900.000		
				Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy ***	Dokumen	1	1	67.200.000	1	67.200.000	1	67.500.000	3	201.900.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAN	
		1.03.12.1.04.004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang ****					67.200.000		67.200.000		67.500.000		201.900.000		
				Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang ****	Dokumen	1	1	67.200.000	1	67.200.000	1	67.500.000	3	201.900.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAN	Balai PSDA Serayu Citanduy.; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Targe t	Rp		
							Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah								95.825.205.000		92.522.804.000		93.008.205.000		281.356.214.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
				Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah	Angka	31,36	31,45	95.825.205.000		92.522.804.000	31,5	93.008.205.000	31,5	281.356.214.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah *							94.725.205.000		91.422.804.000		91.908.205.000		278.056.214.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
				Indeks Kepuasan Masyarakat *	Angka	85	85	94.725.205.000		91.422.804.000	85	91.908.205.000	85	278.056.214.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI **					94.725.205.000		91.422.804.000		91.908.205.000		278.056.214.000		
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	%	100	100	90.496.632.000		87.194.231.000	100	87.679.632.000	100	265.370.495.000	SEKRETARIAT	
		X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ***					74.500.000.000		78.000.000.000		78.500.000.000		231.000.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ***	Dokumen	12	12	74.500.000.000	12	78.000.000.000	12	78.500.000.000	36	231.000.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ****					73.000.000.000		76.500.000.000		77.000.000.000		226.500.000.000		
				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN ****	Orang	565	500	73.000.000.000	500	76.500.000.000	500	77.000.000.000	500	226.500.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD ****					1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		4.500.000.000		
				Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah ****	Laporan	12	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	36	4.500.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ***					267.784.000		267.784.000		267.784.000		803.352.000		
				Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ***	Dokumen	2	2	267.784.000	2	267.784.000	2	267.784.000	6	803.352.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ****					267.784.000		267.784.000		267.784.000		803.352.000		
				Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	1	267.784.000	1	267.784.000	1	267.784.000	3	803.352.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ***					275.000.000		275.000.000		275.000.000		825.000.000		
				Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ***	%	100	100	275.000.000	100	275.000.000	100	275.000.000	100	825.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ****					-		-		-		-		
				Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan ****	Paket	0	0	-	0	-	0	-	0	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ****					-		-		-		-		
				Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian ****	Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	0	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ****					25.000.000		25.000.000		25.000.000		75.000.000		
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan ****	Orang	480	20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	60	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ****					150.000.000		150.000.000		150.000.000		450.000.000		
				Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan ****	Orang	0	480	150.000.000	480	150.000.000	480	150.000.000	1440	450.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan ****					100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan ****	Orang	50	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	300	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					1.978.665.000		1.793.665.000		1.844.665.000		5.616.995.000		
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%	74	77	1.978.665.000	77	1.793.665.000	77	1.844.665.000	77	5.616.995.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					1.186.335.000		1.001.335.000		1.001.335.000		3.189.005.000		
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket	12	12	1.186.335.000	12	1.001.335.000	12	1.001.335.000	36	3.189.005.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000		
				Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Paket	12	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	36	180.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor ****					200.000.000		200.000.000		200.000.000		600.000.000		
				Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan ****	Paket	12	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	36	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ****					47.350.000		47.350.000		47.350.000		142.050.000		
				Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	12	12	47.350.000	12	47.350.000	12	47.350.000	36	142.050.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****					8.500.000		8.500.000		8.500.000		25.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****	Dokumen	2	2	8.500.000	2	8.500.000	2	8.500.000	6	25.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu ****					42.400.000		42.400.000		42.400.000		127.200.000		
				Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu ****	Laporan	12	12	42.400.000	12	42.400.000	12	42.400.000	36	127.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****					184.080.000		184.080.000		185.080.000		553.240.000		
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Dokumen	12	12	184.080.000	12	184.080.000	12	185.080.000	36	553.240.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ****					250.000.000		250.000.000		300.000.000		800.000.000		
				Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah ****	Dokumen	0	3	250.000.000	3	250.000.000	3	300.000.000	9	800.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ***					1.105.000.000		-		-		1.105.000.000		
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ***	Unit	47	32	1.105.000.000	31	-	2	-	65	1.105.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****					965.000.000		-		-		965.000.000		
				Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan ****	Unit	23	3	965.000.000	0	-	0	-	3	965.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		X.XX.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar ****					-		-		-		-		
				Jumlah unit alat besar yang disediakan ****	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****					140.000.000		-		-		140.000.000		
				Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan ****	Unit	24	28	140.000.000	28	-	0	-	56	140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					3.697.644.000		3.763.243.000		3.697.644.000		11.158.531.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan	48	48	3.697.644.000	48	3.763.243.000	48	3.697.644.000	144	11.158.531.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****					68.874.000		68.874.000		68.874.000		206.622.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	12	12	68.874.000	12	68.874.000	12	68.874.000	36	206.622.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					683.980.000		749.579.000		683.980.000		2.117.539.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan	12	12	683.980.000	12	749.579.000	12	683.980.000	36	2.117.539.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		7.500.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Laporan	12	12	2.500.000.000	12	2.500.000.000	12	2.500.000.000	36	7.500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****					444.790.000		444.790.000		444.790.000		1.334.370.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Laporan	12	12	444.790.000	12	444.790.000	12	444.790.000	36	1.334.370.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					8.672.539.000		3.094.539.000		3.094.539.000		14.861.617.000		
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit	408	410	8.672.539.000	422	3.094.539.000	422	3.094.539.000	1254	14.861.617.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****					1.353.000.000		1.353.000.000		1.353.000.000		4.059.000.000		
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit	50	50	1.353.000.000	62	1.353.000.000	62	1.353.000.000	174	4.059.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****					6.571.629.000		941.539.000		941.539.000		8.454.707.000		
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	1	1	6.571.629.000	3	941.539.000	3	941.539.000	7	8.454.707.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****					747.910.000		800.000.000		800.000.000		2.347.910.000		
				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	357	285	747.910.000	285	800.000.000	285	800.000.000	855	2.347.910.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan di Balai PSDA Pemali Comal **	%	100	100	997.495.000	100	997.495.000	100	997.495.000	100	2.992.485.000	Balai PSDA Pemali Comal	
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					104.900.000		104.900.000		104.900.000		314.700.000		
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%	100	100	104.900.000	100	104.900.000	100	104.900.000	100	314.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					38.000.000		38.000.000		38.000.000		114.000.000		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan ****	Paket	2	1	38.000.000	1	38.000.000	1	38.000.000	3	114.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****					20.000.000		20.000.000		20.000.000		60.000.000		
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan ****	Paket	7	7	20.000.000	7	20.000.000	7	20.000.000	21	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****					3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan ****	Dokumen	24	24	3.000.000	24	3.000.000	24	3.000.000	72	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu ****					9.000.000		9.000.000		9.000.000		27.000.000		
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu ****	Laporan	12	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	36	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****					34.900.000		34.900.000		34.900.000		104.700.000		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****	Laporan	36	36	34.900.000	36	34.900.000	36	34.900.000	108	104.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					430.200.000		430.200.000		430.200.000		1.290.600.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan	1	1	430.200.000	1	430.200.000	1	430.200.000	3	1.290.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****					1.200.000		1.200.000		1.200.000		3.600.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	2	12	1.200.000	12	1.200.000	12	1.200.000	36	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					254.000.000		254.000.000		254.000.000		762.000.000		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan ****	Laporan	12	12	254.000.000	12	254.000.000	12	254.000.000	36	762.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****					175.000.000		175.000.000		175.000.000		525.000.000		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan ****	Laporan	1	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	3	525.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					462.395.000		462.395.000		462.395.000		1.387.185.000		
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit	68	78	462.395.000	78	462.395.000	78	462.395.000	234	1.387.185.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****					280.000.000		280.000.000		280.000.000		840.000.000		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya ****	Unit	19	29	280.000.000	29	280.000.000	29	280.000.000	87	840.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****					120.000.000		120.000.000		120.000.000		360.000.000		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi ****	Unit	3	3	120.000.000	3	120.000.000	3	120.000.000	9	360.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****					62.395.000		62.395.000		62.395.000		187.185.000		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi ****	Unit	46	46	62.395.000	46	62.395.000	46	62.395.000	138	187.185.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Bodri Kuto **	%	100	100	739.202.000	100	739.202.000	100	739.202.000	100	2.217.606.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					68.150.000		68.150.000		68.150.000		204.450.000		
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%	100	100	68.150.000	100	68.150.000	100	68.150.000	100	204.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					19.128.000		19.128.000		19.128.000		57.384.000		
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket	4	4	19.128.000	4	19.128.000	4	19.128.000	12	57.384.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****					15.041.000		15.041.000		15.041.000		45.123.000		
				Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	12	12	15.041.000	12	15.041.000	12	15.041.000	36	45.123.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****					3.061.000		3.061.000		3.061.000		9.183.000		
				Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****	Dokumen	12	12	3.061.000	12	3.061.000	12	3.061.000	36	9.183.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu ****					11.130.000		11.130.000		11.130.000		33.390.000		
				Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu ****	Laporan	12	6	11.130.000	6	11.130.000	6	11.130.000	18	33.390.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****					19.790.000		19.790.000		19.790.000		59.370.000		
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	12	24	19.790.000	24	19.790.000	24	19.790.000	72	59.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					290.220.000		290.220.000		290.220.000		870.660.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan	36	27	290.220.000	27	290.220.000	27	290.220.000	81	870.660.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****					912.000		912.000		912.000		2.736.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	12	3	912.000	3	912.000	3	912.000	9	2.736.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					202.980.000		202.980.000		202.980.000		608.940.000		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan ****	Laporan	12	12	202.980.000	12	202.980.000	12	202.980.000	36	608.940.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****					86.328.000		86.328.000		86.328.000		258.984.000		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan ****	Laporan	12	12	86.328.000	12	86.328.000	12	86.328.000	36	258.984.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					380.832.000		380.832.000		380.832.000		1.142.496.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit	90	91	380.832.000	91	380.832.000	91	380.832.000	273	1.142.496.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****					146.200.000		146.200.000		146.200.000		438.600.000		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya ****	Unit	20	21	146.200.000	21	146.200.000	21	146.200.000	63	438.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****					127.250.000		127.250.000		127.250.000		381.750.000		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi ****	Unit	3	3	127.250.000	3	127.250.000	3	127.250.000	9	381.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****					107.382.000		107.382.000		107.382.000		322.146.000		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi ****	Unit	67	67	107.382.000	67	107.382.000	67	107.382.000	201	322.146.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Serang Lusi Juana **	%	100	100	798.698.000	100	798.698.000	100	798.698.000	100	2.396.094.000	Balai PSDA Serang Lusi Juana	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					72.672.000		72.672.000		72.672.000		218.016.000		
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%	100	100	72.672.000	100	72.672.000	100	72.672.000	100	218.016.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					22.500.000		22.500.000		22.500.000		67.500.000		
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket	1	1	22.500.000	1	22.500.000	1	22.500.000	3	67.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****					20.000.000		20.000.000		20.000.000		60.000.000		
				Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	10	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	30	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****					4.392.000		4.392.000		4.392.000		13.176.000		
				Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****	Dokumen	12	12	4.392.000	12	4.392.000	12	4.392.000	36	13.176.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu ****					8.780.000		8.780.000		8.780.000		26.340.000		
				Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu ****	Laporan	10	10	8.780.000	10	8.780.000	10	8.780.000	30	26.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****					17.000.000		17.000.000		17.000.000		51.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	12	12	17.000.000	12	17.000.000	12	17.000.000	36	51.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					246.179.000		246.179.000		246.179.000		738.537.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan	25	25	246.179.000	25	246.179.000	25	246.179.000	75	738.537.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****					1.179.000		1.179.000		1.179.000		3.537.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	1	1	1.179.000	1	1.179.000	1	1.179.000	3	3.537.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					185.000.000		185.000.000		185.000.000		555.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan	12	12	185.000.000	12	185.000.000	12	185.000.000	36	555.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Laporan	12	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	36	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					479.847.000		479.847.000		479.847.000		1.439.541.000		
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit	60	60	479.847.000	60	479.847.000	60	479.847.000	180	1.439.541.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****					165.000.000		165.000.000		165.000.000		495.000.000		
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit	27	27	165.000.000		165.000.000	27	165.000.000	81	495.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****					260.637.000		260.637.000		260.637.000		781.911.000		
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	2	2	260.637.000		260.637.000	2	260.637.000	6	781.911.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****					54.210.000		54.210.000		54.210.000		162.630.000		
				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	31	31	54.210.000		54.210.000	31	54.210.000	93	162.630.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Bengawan Solo **	%	100	100	674.142.000	100	674.142.000	100	674.142.000	100	2.022.426.000	Balai PSDA Bengawan Solo	
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					70.698.000		70.698.000		70.698.000		212.094.000		
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%	100	100	70.698.000		70.698.000	100	70.698.000	100	212.094.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					23.514.000		23.514.000		23.514.000		70.542.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket	4	4	23.514.000	4	23.514.000	4	23.514.000	12	70.542.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****					15.000.000		15.000.000		15.000.000		45.000.000		
				Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	36	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****					1.584.000		1.584.000		1.584.000		4.752.000		
				Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****	Dokumen	12	12	1.584.000	12	1.584.000	12	1.584.000	36	4.752.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu ****					6.600.000		6.600.000		6.600.000		19.800.000		
				Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu ****	Laporan	7	7	6.600.000	7	6.600.000	7	6.600.000	21	19.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****					24.000.000		24.000.000		24.000.000		72.000.000		
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	12	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	36	72.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					307.849.000		307.849.000		307.849.000		923.547.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan	26	26	307.849.000	26	307.849.000	26	307.849.000	78	923.547.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****					849.000		849.000		849.000		2.547.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	2	2	849.000	2	849.000	2	849.000	6	2.547.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					199.000.000		199.000.000		199.000.000		597.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan	12	12	199.000.000	12	199.000.000	12	199.000.000	36	597.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****					108.000.000		108.000.000		108.000.000		324.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Laporan	12	12	108.000.000	12	108.000.000	12	108.000.000	36	324.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					295.595.000		295.595.000		295.595.000		886.785.000		
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit	37	37	295.595.000	37	295.595.000	37	295.595.000	111	886.785.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****					142.752.000		142.752.000		142.752.000		428.256.000		
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit	24	24	142.752.000	24	142.752.000	24	142.752.000	72	428.256.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****					106.493.000		106.493.000		106.493.000		319.479.000		
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	3	3	106.493.000	3	106.493.000	3	106.493.000	9	319.479.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****					46.350.000		46.350.000		46.350.000		139.050.000		
				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	10	10	46.350.000	10	46.350.000	10	46.350.000	30	139.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo **	%	100	100	469.653.000	100	469.653.000	100	469.653.000	100	1.408.959.000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					77.266.000		77.266.000		77.266.000		231.798.000		
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%	100	100	77.266.000	100	77.266.000	100	77.266.000	100	231.798.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					17.575.000		17.575.000		17.575.000		52.725.000		
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket	2	2	17.575.000	2	17.575.000	2	17.575.000	6	52.725.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****					13.825.000		13.825.000		13.825.000		41.475.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	14	14	13.825.000	14	13.825.000	14	13.825.000	42	41.475.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****					2.200.000		2.200.000		2.200.000		6.600.000		
				Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****	Dokumen	12	12	2.200.000	12	2.200.000	12	2.200.000	36	6.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu ****					6.353.000		6.353.000		6.353.000		19.059.000		
				Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu ****	Laporan	3	3	6.353.000	3	6.353.000	3	6.353.000	9	19.059.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****					37.313.000		37.313.000		37.313.000		111.939.000		
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	12	12	37.313.000	12	37.313.000	12	37.313.000	36	111.939.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					187.588.000		187.588.000		187.588.000		562.764.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan	15	15	187.588.000	15	187.588.000	15	187.588.000	45	562.764.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****					838.000		838.000		838.000		2.514.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	2	2	838.000	2	838.000	2	838.000	6	2.514.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					122.100.000		122.100.000		122.100.000		366.300.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan	12	12	122.100.000	12	122.100.000	12	122.100.000	36	366.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****					64.650.000		64.650.000		64.650.000		193.950.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Laporan	1	1	64.650.000	1	64.650.000	1	64.650.000	3	193.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					204.799.000		204.799.000		204.799.000		614.397.000		
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit	32	32	204.799.000	32	204.799.000	32	204.799.000	96	614.397.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****					86.450.000		86.450.000		86.450.000		259.350.000		
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit	20	20	86.450.000	20	86.450.000	20	86.450.000	60	259.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****					70.000.000		70.000.000		70.000.000		210.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	3	3	70.000.000	3	70.000.000	3	70.000.000	9	210.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****					48.349.000		48.349.000		48.349.000		145.047.000		
				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	9	9	48.349.000	9	48.349.000	9	48.349.000	27	145.047.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Serayu Citanduy **	%	100	100	549.383.000	100	549.383.000	100	549.383.000	100	1.648.149.000	Balai PSDA Serayu Citanduy.	
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					77.561.000		77.561.000		77.561.000		232.683.000		
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%	100	100	77.561.000	100	77.561.000	100	77.561.000	100	232.683.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					19.672.000		19.672.000		19.672.000		59.016.000		
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket	1	1	19.672.000	1	19.672.000	1	19.672.000	3	59.016.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****					15.809.000		15.809.000		15.809.000		47.427.000		
				Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	1	1	15.809.000	1	15.809.000	1	15.809.000	3	47.427.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****					2.500.000		2.500.000		2.500.000		7.500.000		
				Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****	Dokumen	1	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	3	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu ****					8.380.000		8.380.000		8.380.000		25.140.000		
				Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu ****	Laporan	1	1	8.380.000	1	8.380.000	1	8.380.000	3	25.140.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****					31.200.000		31.200.000		31.200.000		93.600.000		
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	1	1	31.200.000	1	31.200.000	1	31.200.000	3	93.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					182.890.000		182.890.000		182.890.000		548.670.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan	3	3	182.890.000	3	182.890.000	3	182.890.000	9	548.670.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****					958.000		958.000		958.000		2.874.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	1	1	958.000	1	958.000	1	958.000	3	2.874.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					145.200.000		145.200.000		145.200.000		435.600.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan	1	1	145.200.000	1	145.200.000	1	145.200.000	3	435.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****					36.732.000		36.732.000		36.732.000		110.196.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Laporan	1	1	36.732.000	1	36.732.000	1	36.732.000	3	110.196.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					288.932.000		288.932.000		288.932.000		866.796.000		
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit	49	56	288.932.000	56	288.932.000	56	288.932.000	168	866.796.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****					117.580.000		117.580.000		117.580.000		352.740.000		
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit	23	30	117.580.000	30	117.580.000	30	117.580.000	90	352.740.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****					95.636.000		95.636.000		95.636.000		286.908.000		
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	1	1	95.636.000	1	95.636.000	1	95.636.000	3	286.908.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****					75.716.000		75.716.000		75.716.000		227.148.000		
				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	25	25	75.716.000	25	75.716.000	25	75.716.000	75	227.148.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah *							1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		3.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
				Indeks Manajemen Risiko Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah *	Angka	33,131	3,15	1.100.000.000	3,16	1.100.000.000	3,17	1.100.000.000	3,17	3.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI **					1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		3.300.000.000		
				Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah **	%	100	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000	100	3.300.000.000	SEKRETARIAT	
		X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ***					1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		3.300.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ***	%	100	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000	100	3.300.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ****					500.000.000		500.000.000		500.000.000		1.500.000.000		
				Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	12	1.500.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****					600.000.000		600.000.000		600.000.000		1.800.000.000		
				Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah ****	Laporan	3	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	9	1.800.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH; OPD Provinsi

Keterangan:

- Tujuan
- Kelompok Sasaran
- Kelompok Kegiatan
- Kelompok Sub Kegiatan

BAB VII

RENSTRA

2024-2026

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah berupa indikator tujuan dan/atau sasaran dan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan berupa indikator program, ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas PUSDATARU
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	Angka	43,47	49,42	57,54	61,81	66,47	71,92	71,92
2	Persentase Tingkat kualitas Pengelolaan SDA	%	51,81	56,27	60,40	62,06	64,17	66,29	66,29
3	Persentase keterwujudan penataan ruang	%	35,13	42,58	54,67	61,57	68,76	77,56	77,56
4	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	31,30	31,36	31,40	31,45	31,50	31,50	31,50
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85	85	85	85	85	85	85
6	Indeks Manajemen Risiko	Angka	3,000	3,131	3,140	3,150	3,160	3,170	3,170

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah
Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)								
1	Persentase kondisi baik Embung dan Penampung Air Lainnya Kewenangan Provinsi Jawa Tengah	%	58.16	60.04	61.92	64.79	67.68	70.58	70.58
2	Presentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah BPSDA Pemali Comal	%	34.78	34.78	34.78	34.79	34.80	34.81	34.81
3	Presentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah BPSDA Bodri Kuto	%	27.27	36.36	45.45	54.55	63.64	72.73	72.73
4	Presentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah BPSDA Serang Lusi Juana	%	47.06	47.06	47.06	52.94	58.82	64.71	64.71
5	Presentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah BPSDA Bengawan Solo	%	77.72	77.74	77.76	77.78	77.80	77.82	77.82
6	Presentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah BPSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	92.15	92.17	92.19	92.21	92.23	92.25	92.25

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
7	Presentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah BPSDA Serayu Citanduy	%	69.95	72.11	74.27	76.50	78.79	81.15	81.15
8	Kinerja Sistem Irigasi	%	68.51	68.68	68.85	69.14	69.31	69.49	69.49
9	Kinerja Sistem Irigasi di wilayah BPSDA Pemali Comal	%	62.61	62.64	62.67	62.70	62.73	62.76	62.76
10	Kinerja Sistem Irigasi di wilayah BPSDA Bodri Kuto	%	71.76	71.78	71.80	71.82	71.84	71.86	71.86
11	Kinerja Sistem Irigasi di wilayah BPSDA Serang Lusi Juana	%	62.35	62.55	62.75	62.95	63.15	63.35	63.35
12	Kinerja Sistem Irigasi di wilayah BPSDA Bengawan Solo	%	67.23	67.27	67.31	67.35	67.39	67.43	67.43
13	Kinerja Sistem Irigasi di wilayah BPSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	77.30	77.32	77.34	77.36	77.38	77.40	77.40
14	Kinerja Sistem Irigasi di wilayah BPSDA Serayu Citanduy	%	69.80	70.51	71.22	72.65	73.37	74.11	74.11
15	Persentase kondisi baik sungai kewenangan Provinsi	%	52.29	52.32	52.36	52.40	52.44	52.48	52.48
16	Persentase kondisi baik sungai Kewenangan Provinsi di wilayah BPSDA Pemali Comal	%	53.22	53.22	53.26	53.28	53.32	53.36	53.36
17	Persentase kondisi baik sungai Kewenangan Provinsi di wilayah BPSDA Bodri Kuto	%	49.93	49.97	49.97	50.06	50.10	50.14	50.14
18	Persentase penyediaan rencana teknis terhadap rencana pembangunan infrastruktur SDA	%	28.30	44.03	58.49	58.82	61,90	67,29	72,61
19	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah BPSDA Pemali Comal	%	100	100	100	100	100	100	100
20	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah BPSDA Bodri Kuto	%	100	100	100	100	100	100	100
21	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah BPSDA Serang Lusi Juana	%	100	100	100	100	100	100	100
22	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah BPSDA Bengawan Solo	%	100	100	100	100	100	100	100
23	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah BPSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	100	100	100	100	100	100
23	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah BPSDA Serayu Citanduy	%	100	100	100	100	100	100	100
B	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang								
24	Persentase ketersediaan rencana tata ruang	%	29.40	46.75	69.00	60.71	69.29	77.67	77.67
25	Persentase implementasi pemanfaatan ruang	%	60.00	60.00	60.00	68.00	76.00	88.00	88.00
26	Persentase tertib ruang	%	16.00	21.00	35.00	56.00	61.00	67.00	67.00
27	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Pemali Comal	%	30	100.00	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
28	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Bodri Kuto	%	15	100.00	100	100	100	100	100
29	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Serang Lusi Juana	%	65	100.00	100	100	100	100	100
30	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Bengawan Solo	%	35	100.00	100	100	100	100	100
31	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	40	100.00	100	100	100	100	100
32	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Serayu Citanduy	%	30	100.00	100	100	100	100	100
C	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi								
33	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100.00	100	100	100	100	100
34	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Pemali Comal	%	100	100.00	100	100	100	100	100
35	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	100.00	100	100	100	100	100
36	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	100.00	100	100	100	100	100
37	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	100.00	100	100	100	100	100
38	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	100.00	100	100	100	100	100
39	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	103.2	103.59	100	100	100	100	100

BAB VIII

RENSTRA

2024-2026

BAB VIII PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Renstra Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah ini merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan kinerja akhir Renstra/RPD. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 adalah:

- 1) Indeks Pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, dengan target tahun 2024 sebesar 61,81 dan akhir tahun 2026 sebesar 71,92;
- 2) Persentase Tingkat kualitas Pengelolaan SDA, dengan target tahun 2024 sebesar 62,06% dan akhir tahun 2026 sebesar 66,29%;
- 3) Persentase keterwujudan penataan ruang, dengan target tahun 2024 sebesar 61,57% dan akhir tahun 2026 sebesar 77,56%;
- 4) Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah), dengan target tahun 2024 sebesar 31,45 dan akhir tahun 2026 sebesar 31,50;
- 5) Indeks Manajemen Risiko, dengan target tahun 2024 sebesar 3,150 dan akhir tahun 2026 sebesar 3,170;
- 6) Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan target tahun 2024 sebesar 85 dan akhir tahun 2026 sebesar 85;

8.2. Catatan dan Harapan

- 1) Renstra Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 ini telah mengacu pada RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Renstra Kementerian ATR/BPN;
- 2) Untuk mencapai target sasaran Renstra, pelaksanaan program dan kegiatan melalui Renja Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah membutuhkan dukungan pemenuhan pendanaan serta penguatan peran kelembagaan pengelola SDA dan kolaborasi para pihak;
- 3) Kondisi alam, sosial, politik, perekonomian dan stabilitas nasional yang kondusif sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan pencapaian target.

LAMPIRAN

RENSTRA

2024-2026

POHON KINERJA

Meningkatnya Pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air

Meningkatnya Keterwujudan Penataan Ruang

kondisi fisik sungai kewenangan provinsi dengan kategori baik

Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya

Ketersediaan Data dan Dokumen Pencanaan dan Pengembangan Teknis Sarana Prasarana SDA

ketersediaan rencana tata ruang

implementasi pemanfaatan ruang

tertib ruang

panjang sarpras sungai & pantai yang terbangun

kondisi sarpras sungai

partisipasi masy dlm konservasi SDA

Kondisi Baik Jaringan Irigasi Kew. Provinsi

Jumlah Bangunan embung & penampung air lainnya yg terbangun

Tersedianya Data & Dok. Perencanaan serta Pengembangan Teknis Sarana Prasarana SDA

Tersedianya Data dan Dokumen Perencanaan Teknis Irigasi

ketersediaan dokumen kegiatan perencanaan tata ruang

ketersediaan dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang

ketersediaan dokumen implementasi pelaksanaan pemanfaatan ruang

ketersediaan dokumen pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang

Terbangunnya sarpras sungai dan pantai

Terpeliharanya sarpras sungai dan pantai

Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kew. Provinsi

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA

Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya

Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi

Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi

Tersusunnya Evaluasi dan (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi

Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya, Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai

Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi

Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah

Sistem Informasi Penataan Ruang

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang

ISU STRATEGIS	Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan dan Keterwujudan Tata Ruang	
TUJUAN	Meningkatkan Pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
INDIKATOR	Indeks Pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
Satuan	angka	
Definisi Operasional	Rata-rata capaian sasaran kualitas pengelolaan SDA dan keterwujudan penataan ruang	
Formulasi	Rata-rata capaian sasaran kualitas pengelolaan SDA dan keterwujudan penataan ruang	
SASARAN	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatnya Keterwujudan Penataan Ruang
INDIKATOR	Persentase Tingkat kualitas Pengelolaan SDA	persentase keterwujudan penataan ruang
Satuan	%	%
Definisi Operasional	Rata-rata persentase akumulasi capaian indikator program pengelolaan SDA	Rata-rata capaian persentase ketersediaan rencana tata ruang, persentase implementasi pemanfaatan ruang, dan persentase tertib ruang
Formulasi	Rata-rata persentase akumulasi capaian indikator program pengelolaan SDA	Rata-rata capaian persentase ketersediaan rencana tata ruang, persentase implementasi pemanfaatan ruang, dan persentase tertib ruang

ISU STRATEGIS	Tata kelola organisasi Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah	
TUJUAN	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah	
INDIKATOR	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah	
Satuan	angka	
Definisi Operasional	Indeks RB menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan, yang diukur dari unsur komponen pengungkit (meliputi 8 area perubahan) dan komponen hasil	
Formulasi	(Nilai x Bobot Komponen Pengungkit) + (Nilai x Bobot Komponen Hasil)	
SASARAN	Meningkatnya kualitas pengelolaan	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah
INDIKATOR	Indeks Manajemen Risiko Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah	Indeks Kepuasan Masyarakat
Satuan	angka	angka
Definisi Operasional	Ukuran yang menggambarkan implementasi manajemen risiko di lingkup perangkat daerah	IKM untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah, yang didapatkan dari survei kepuasan masyarakat
Formulasi	Total (Nilai komponen MR x Bobot)	Nilai hasil survei kepuasan masyarakat dari 9 unsur SKM (skala 1-4) yang dikonversi menjadi IKM

PROGRAM	Program Pengelolaan SDA						
SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Ketersediaan Data dan Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Teknis Sarana Prasarana SDA						
INDIKATOR	Persentase penyediaan rencana teknis terhadap rencana pembangunan infrastruktur SDA						
Satuan	%						
Definisi Operasional	Akumulasi jumlah dokumen rencana teknis terhadap kebutuhan rencana pembangunan infrastruktur SDA						
Formulasi	(total jumlah ketersediaan dokumen / jumlah kebutuhan rencana pembangunan) X 100						
ORGANISASI	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis						
KEGIATAN	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
SASARAN KEGIATAN	Tersedianya Data dan Dokumen Perencanaan Teknis Irigasi		Tersedianya Data dan Dokumen Perencanaan serta Pengembangan Teknis Sarana Prasarana SDA				
INDIKATOR	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana Irigasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana SDA	Jumlah dokumen pengembangan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan provinsi	Jumlah Data Sistem Hidrologi dan Kualitas Air pendukung Perencanaan Dan Pengembangan Teknis Sarana Prasarana SDA			
Satuan	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen			
Definisi Operasional	Akumulasi Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sana Prasarana Irigasi	Akumulasi Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana SDA	Akumulasi Jumlah dokumen pengembangan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan provinsi	Akumulasi Jumlah Data Sistem Hidrologi dan Kualitas Air pendukung Perencanaan Dan Pengembangan Teknis Sarana Prasarana SDA			
Formulasi	Akumulasi Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana Irigasi	Akumulasi Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana SDA	Akumulasi Jumlah dokumen pengembangan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan provinsi	Akumulasi Jumlah Data Sistem Hidrologi dan Kualitas Air pendukung Perencanaan Dan Pengembangan Teknis Sarana Prasarana SDA			
ORGANISASI	Seksi SID		Seksi Bangguna		Seksi H S I		
SUB KEGIATAN	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)
KINERJA SUB KEGIATAN	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Tersusunnya Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Flood Forecasting And Warning System (FFWS)
INDIKATOR	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan
Satuan	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	unit
Definisi Operasional	Menghitung Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Menghitung Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Menghitung Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Menghitung Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Menghitung Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Menghitung Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Menghitung Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan
Formulasi	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan

Program Pengelolaan SDA	
Meningkatnya Kinerja Sistem Irigasi dan Kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya	
Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya Kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik	Indeks Kinerja Sistem Irigasi
%	angka
Menghitung realisasi kondisi baik Embung dan Penampung Air Lainnya Kewenangan Provinsi Jawa Tengah	Rata-rata hasil penilaian 6 komponen indikator kinerja sistem irigasi
Rata-rata persentase Embung dan Penampung Air Lainnya Kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik yang berada di Wilayah 6 Balai PSDA	Rata-rata hasil penilaian 6 komponen indikator kinerja sistem irigasi
Bidang Irigasi dan Air Baku	

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Meningkatnya jumlah Bangunan Embung dan penampung air lainnya yang terbangun		Meningkatnya Kondisi Baik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi		
Jumlah laporan peningkatan kapasitas lembaga pengelolaan SDA dan laporan kerjasama dan pengelolaan aset	Total Bangunan Embung dan penampung air lainnya yang terbangun	Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kondisi fisik tampungan air yang terbangun	Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja sistem irigasi kewenangan provinsi	Jumlah DI yang direhab
dokumen	unit	dokumen	dokumen	DI
Akumulasi jumlah laporan peningkatan kapasitas lembaga pengelolaan SDA dan laporan kerjasama dan pengelolaan aset	Akumulasi Jumlah Bangunan Embung dan penampung air lainnya yang terbangun sampai dengan tahun berjalan	Akumulasi Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kondisi fisik tampungan air yang terbangun	Akumulasi Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja sistem irigasi	Akumulasi jumlah DI yang di rehab pada tahun berjalan
Akumulasi jumlah laporan peningkatan kapasitas lembaga pengelolaan SDA dan laporan kerjasama dan pengelolaan aset	Akumulasi Jumlah Bangunan Embung dan penampung air lainnya yang terbangun sampai dengan tahun berjalan	Akumulasi Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kondisi fisik tampungan air yang terbangun	Akumulasi Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja sistem irigasi	Akumulasi jumlah DI yang di rehab pada tahun berjalan

Seksi KMA		Seksi PR IAB		Seksi OP IAB		Seksi PR IAB
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi		Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Terehabilitasinya Embung dan Penampungan Air Lainnya	Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan
Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah laporan kerjasama dan pengelolaan aset	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	Jumlah Kelembagaan Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan
Unit	Laporan	Unit	Unit	Unit	DI	Unit
Menghitung Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Menghitung Jumlah laporan kerjasama dan pengelolaan aset	Menghitung Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Menghitung Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Menghitung Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Menghitung Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	Menghitung Jumlah Kelembagaan Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan
Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah laporan kerjasama dan pengelolaan aset	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	Jumlah Kelembagaan Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi

Program Pengelolaan SDA		
Meningkatnya kondisi fisik sungai kewenangan provinsi dengan kategori baik		
Persentase kondisi fisik sungai kewenangan provinsi dengan kategori baik		
%		
Panjang sungai dalam kondisi baik terhadap total panjang sungai kewenangan provinsi		
(Panjang sungai dalam kondisi baik terhadap total panjang sungai kewenangan provinsi) x 100%		
Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai		

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Meningkatnya panjang sarpras sungai dan pantai yang terbangun	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam konservasi SDA	Mempertahankan kondisi sarpras sungai
akumulasi panjang sarpras sungai pantai terbangun	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA	Panjang penanganan darurat sarpras sungai yang rusak akibat banjir
KM	kegiatan	KM
akumulasi panjang sarpras sungai pantai terbangun	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA	Panjang penanganan darurat sarpras sungai yang rusak akibat banjir
akumulasi panjang sarpras sungai pantai terbangun	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA	Panjang penanganan darurat sarpras sungai yang rusak akibat banjir

Seksi PR SBP				Seksi OP SBP	Seksi PBP
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Pembangunan Check Dam	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Normalisasi/Restorasi Sungai	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Terbangunnya Check Dam	Terbangunnya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Tertaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai
Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Jumlah Check Dam yang Dibangun	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara
KM	Unit	KM	KM	Unit	KM
Menghitung Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Menghitung Jumlah Check Dam yang Dibangun	Menghitung Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	Menghitung Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	Menghitung Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Menghitung Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara
Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Jumlah Check Dam yang Dibangun	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara

Program Pengelolaan SDA				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Mempertahankan Kinerja Sistem	Mempertahankan kondisi sungai	Tersedianya dokumen pengendalian	Meningkatnya terlibat ruang	
Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah BPSDA	Persentase kondisi baik sungai di wilayah BPSDA	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah BPSDA	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA	
angka	%	%	%	%
Rata-rata hasil penilaian 6 komponen indikator kinerja sistem irigasi (IKSI) di Wilayah BPSDA	Jumlah kondisi baik embung dan penampung air lainnya terhadap total jumlahnya di wilayah BPSDA	Kondisi Fisik Sungai Kewenangan Provinsi di Wilayah BPSDA (N-1)	Realisasi ketersediaan dibanding rencana kebutuhan dokumen	Realisasi pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA
Rata-rata hasil penilaian 6 komponen indikator kinerja sistem irigasi di Wilayah Balai PSDA	(jumlah kondisi baik/ total jumlah embung) X 100	Hasil Penghitungan Kondisi Fisik Sungai Kewenangan Provinsi di Wilayah Balai PSDA (N-1)	(Realisasi/kebutuhan) X 100	Realisasi pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA
6 BPSDA	6 BPSDA	2 BPSDA	6 BPSDA	6 BPSDA

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
Mempertahankan kondisi baik jaringan irigasi di wilayah Balai PSDA	Mempertahankan kinerja Embung dan Penampung Air Lainnya	Mempertahankan kondisi sarpras sungai	Tersedianya dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Tersedianya dokumen pemantauan pemanfaatan ruang
Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA	Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA	Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA	Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA
%	%	%	dokumen	dokumen
Jumlah Di kondisi baik terhadap total jumlah Di di wilayah BPSDA (komponen IKSI)	Jumlah sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara terhadap total jumlahnya di wilayah BPSDA	Realisasi pemeliharaan dibanding rencana kebutuhan pemeliharaan sungai di wilayah Balai PSDA	Jumlah akumulasi dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang
Jumlah Di kondisi baik terhadap total jumlah Di di wilayah BPSDA (komponen IKSI)	Jumlah sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara terhadap total jumlahnya di wilayah BPSDA	Realisasi pemeliharaan dibanding rencana kebutuhan pemeliharaan sungai di wilayah Balai PSDA	Jumlah akumulasi dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang

Seksi OP (6 Balai)		Seksi OP (2 Balai)		Seksi Dalguna (2 Balai) / Seksi Dalguna (4 Balai)		Seksi Dalguna (6 Balai)	
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai		Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi		Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di wilayah Balai PSDA	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara		Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen laporan pengendalian dan pendayagunaan SDA di BPSDA	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA	
KM	Unit	KM		Dokumen	Dokumen	Dokumen	
Menghitung Panjang seluruh Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA	Menghitung Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di wilayah Balai PSDA	Menghitung Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara		Menghitung Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi di wilayah Balai PSDA	Menghitung Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA di Wilayah BPSDA	Menghitung Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA	
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di wilayah BPSDA	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di wilayah Balai PSDA	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara		Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi di wilayah Balai PSDA	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA di Wilayah BPSDA	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA	

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		
Meningkatnya ketersediaan rencana tata ruang	Meningkatnya implementasi pemanfaatan ruang	Meningkatnya tertib ruang
Persentase ketersediaan rencana tata ruang	Persentase implementasi pemanfaatan ruang	Persentase tertib ruang
%	%	%
Rata-rata capaian persentase dokumen perencanaan tata ruang provinsi (penyusunan RTRW Provinsi/ kajian arahan pengembangan kewilayahan) dan persentase dokumen pembahasan Rencana tata ruang Kab/Kota yang terfasilitasi (fasilitasi RTR Kab/Kota)	Akumulasi hasil pembobotan sinkronisasi program (60%) dan rekomendasi pemanfaatan ruang (40%)	Akumulasi hasil pembobotan instrumen pengendalian (40%), pembinaan (20%), dan pengawasan (40%)
Rata-rata capaian persentase dokumen perencanaan tata ruang provinsi (penyusunan RTRW Provinsi/ kajian arahan pengembangan kewilayahan) dan persentase dokumen pembahasan Rencana tata ruang Kab/Kota yang terfasilitasi (fasilitasi RTR Kab/Kota)	Akumulasi hasil pembobotan sinkronisasi program (60%) dan rekomendasi pemanfaatan ruang (40%)	Akumulasi hasil pembobotan instrumen pengendalian (40%), pembinaan (20%), dan pengawasan (40%)

Bidang Penataan Ruang

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Pengawasan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
meningkatnya ketersediaan dokumen kegiatan perencanaan tata ruang	Meningkatnya ketersediaan dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya dokumen implementasi pelaksanaan pemanfaatan ruang	Meningkatnya dokumen pengawasan penataan ruang	Meningkatnya ketersediaan dokumen pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang
Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen implementasi pelaksanaan pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen pengawasan penataan ruang	Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang
dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen
Akumulasi Jumlah Dokumen Perencanaan (Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi/ Jumlah Dokumen Arahan Pengembangan Kewilayahan), dan Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Akumulasi jumlah laporan pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyusunan RTR Kab/Kota atau jumlah berita acara pembahasan RTR Kab/Kota atau SK Gubernur Hasil Evaluasi RTRW Kab/Kota atau surat hasil fasilitasi ranperkada RDTR dan jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Provinsi	Akumulasi Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah dan Jumlah Data dan Informasi yang Dihilaskan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	akumulasi Jumlah dokumen pengawasan penataan ruang	Akumulasi jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang
Akumulasi jumlah dokumen perencanaan (penetapan RTRW Provinsi atau jumlah dokumen arahan pengembangan kewilayahan) dan jumlah dokumen sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang	Akumulasi jumlah laporan pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyusunan RTR Kab/Kota atau jumlah berita acara pembahasan RTR Kab/Kota atau SK Gubernur Hasil Evaluasi RTRW Kab/Kota atau surat hasil fasilitasi ranperkada RDTR dan jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Provinsi	Akumulasi Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah dan Jumlah Data dan Informasi yang Dihilaskan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	akumulasi Jumlah dokumen pengawasan penataan ruang	Akumulasi jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang

Seksi PTR				Seksi PR		Seksi PPR			
Penetapan RTRW Provinsi	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Sistem Informasi dan komunikasi penataan ruang	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
Tersedianya Perda RTRW Provinsi	Tersampainya substansi pengaturan bidang penataan ruang kepada pemangku kepentingan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Terlaksananya Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Tersedianya Data dan Informasi yang Dihilaskan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
Jumlah Perda RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Arahan Pengembangan Kewilayahan	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihilaskan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Dokumen Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
Dokumen	Dokumen	orang	Dokumen	Laporan	Laporan	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
Jumlah Perda RTRW Provinsi yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Arahan Pengembangan Kewilayahan yang tersusun	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Menghitung Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota yang disusun	Menghitung jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Menghitung Jumlah Data dan Informasi yang Dihilaskan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Menghitung Jumlah Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Dokumen Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Menghitung Jumlah Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan yang tersusun	Menghitung Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
Jumlah Perda RTRW Provinsi yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Arahan Pengembangan Kewilayahan yang tersusun	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota yang disusun	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang yang disusun	Jumlah Data dan Informasi yang Dihilaskan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Dokumen Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Jumlah Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan yang tersusun	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

MANAJEMEN RESIKO
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG 2024-2026

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Tingkat kualitas Pengelolaan SDA	Menurunnya kinerja sistem irigasi	Resiko Strategis	kerusakan sarpras jaringan irigasi, kurang efektifnya manajemen alokasi air, terbatasnya kapasitas SDM dan kelembagaan	Produktivitas pertanian menurun	Masyarakat
				Terbatasnya pemenuhan kebutuhan air baku	Resiko Strategis	kurangnya jumlah sarpras air baku	Tidak terpenuhinya kebutuhan air baku	Masyarakat
				Menurunnya kondisi fisik sungai kewenangan provinsi	Resiko Strategis	kerusakan sarpras sungai, terbatasnya bangunan pengendali banjir, rendahnya kepedulian masyarakat	Meningkatnya ancaman bencana banjir/rob	Masyarakat
2	Sasaran Strategis	Meningkatnya Keterwujudan Penataan Ruang	persentase keterwujudan penataan ruang	Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Resiko Strategis	Terbatasnya Ketersediaan Rencana Tata Ruang (RTR) sebagai acuan pembangunan	Terganggunya aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.	Pemerintah Daerah dan Masyarakat
						Belum optimalnya aspek pengaturan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penataan ruang.		
						Kurangnya pemahaman SDM pemerintah daerah dibidang penataan ruang		

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Menurunnya kinerja sistem irigasi	4	4	16	Ada	Rehabilitasi dan pemeliharaan sarpras jaringan irigasi, rakor alokasi air, pembinaan SDM dan kelembagaan	memadai	3	4	12
Terbatasnya pemenuhan kebutuhan air baku	4	4	16	Ada	Membangun embung dan tampungan air lainnya	belum memadai	3	4	12
Menurunnya kondisi fisik sungai kewenangan provinsi	4	4	16	Ada	pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarpras sungai	belum memadai	4	4	16
Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan daerah	4	4	16	ada	Tersedianya RTR (Rencana Tata Ruang)	memadai	3	4	12
					Pembinaan penyelenggaraan penataan ruang	memadai			
					Pengendalian pemanfaatan ruang	belum memadai			

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Menurunnya kinerja sistem irigasi	12	Kepala Dinas	kerusakan sarpras jaringan irigasi, kurang efektifnya manajemen alokasi air, terbatasnya kapasitas SDM dan kelembagaan	Produktivitas pertanian menurun
Terbatasnya pemenuhan kebutuhan air baku	12	Kepala Dinas	kurangnya jumlah sarpras air baku	Tidak terpenuhinya kebutuhan air baku
Menurunnya kondisi fisik sungai kewenangan provinsi	12	Kepala Dinas	kerusakan sarpras sungai, terbatasnya bangunan pengendali banjir, rendahnya kepedulian masyarakat	Meningkatnya ancaman bencana banjir/rob
Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan daerah	12	Kepala Dinas	Terbatasnya Ketersediaan Rencana Tata Ruang (RTR) sebagai acuan pembangunan	Terganggunya aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.
			Belum optimalnya aspek pengaturan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penataan ruang.	
			Kurangnya pemahaman SDM pemerintah daerah dibidang penataan ruang	

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Tingkat kualitas Pengelolaan SDA	Menurunnya kinerja sistem irigasi	12	kerusakan sarpras jaringan irigasi, kurang efektifnya manajemen alokasi air, terbatasnya kapasitas SDM dan kelembagaan	Produktivitas pertanian menurun	Rehabilitasi dan pemeliharaan sarpras jaringan irigasi, rakor alokasi air, pembinaan SDM dan kelembagaan	Kepala Dinas	Setiap tahun
		Terbatasnya pemenuhan kebutuhan air baku	12	kurangnya jumlah sarpras air baku	Tidak terpenuhinya kebutuhan air baku	Membangun embung dan tampungan air lainnya	Kepala Dinas	Setiap tahun
		Menurunnya kondisi fisik sungai kewenangan provinsi	12	kerusakan sarpras sungai, terbatasnya bangunan pengendali banjir, rendahnya kepedulian masyarakat	Meningkatnya ancaman bencana banjir/rob	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarpras sungai	Kepala Dinas	Setiap tahun
Meningkatnya Keterwujudan Penataan Ruang	persentase keterwujudan penataan ruang	Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan daerah	12	Terbatasnya Ketersediaan Rencana Tata Ruang (RTR) sebagai acuan pembangunan	Terganggunya aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.	Mendorong kementerian/ lembaga untuk mensinkronkan kebijakan dengan memperhatikan kondisi aktual wilayah kabupaten/kota agar kebijakan dapat diimplementasikan	Kepala Dinas	Setiap Tahun
				Belum optimalnya aspek pengaturan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penataan ruang.		Mengoptimalkan koordinasi antar sektor dalam perencanaan pemanfaatan ruang sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan		
				Kurangnya pemahaman SDM pemerintah daerah dibidang penataan ruang		Penguatan kapasitas SDM melalui sosialisasi, bimtek, seminar, dan workshop.		